

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
 NOMOR 9 TAHUN 2015
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015-2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015
 DINAS PENDAPATAN DAERAH
 KOTA PONTIANAK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Penjelasan / FORM Perhitungan	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	1 Persentase Tingkat Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak daerah	<p>a Penjelasan Dalam meningkatkan kemandirian daerah pada sektor pengelolaan keuangan, terutama pada penerimaan asli daerah yang berasal dari penerimaan pajak daerah, maka salah satu ukuran adalah meningkatnya realisasi penerimaan pajak daerah. Sedangkan Persentase tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah adalah persentase tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun yang dilaporkan dibandingkan dengan tahun sebelumnya</p> <p>* Perhitungan</p> $A = \frac{(B - C)}{C} \times 100 \%$ <p>Keterangan A = Persentase tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah tahun yang dilaporkan B = Jumlah realisasi penerimaan pajak daerah tahun yang dilaporkan C = Jumlah realisasi penerimaan pajak daerah tahun sebelumnya (N-1)</p>	5.04%
		2 Persentase Tingkat Pertumbuhan Potensi Pajak Daerah	<p>a Penjelasan Dalam meningkatkan penerimaan daerah pada, terutama pada penerimaan pajak daerah, maka salah satu faktor utama adalah meningkatnya jumlah wajib pajak yang terdaftar dalam melakukan pembayaran pajak daerah.</p> <p>* Perhitungan</p> $A = \frac{B - C}{C} \times 100 \%$ <p>Keterangan A = Persentase Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar Melakukan Pembayaran Pajak Daerah tahun yang dilaporkan B = Jumlah Waiib Paiak vane terdaftar tahun vane dilaporkn C = Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan melakukan pembayaran tahun yang dilaporkan</p>	5%
2	Meningkatnya Kesadaran Membayar Dalam Membayar Pajak Daerah	1 Persentase Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar melakukan pembayaran Pajak Daerah	<p>a Penjelasan Dalam meningkatkan penerimaan daerah pada, terutama pada penerimaan pajak daerah, maka salah satu faktor utama adalah meningkatnya jumlah wajib pajak yang terdaftar dalam melakukan pembayaran pajak daerah. Sedangkan Persentase Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar Melakukan Pembayaran Pajak Daerah pada tahun yang dilaporkan dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar</p> <p>* Perhitungan</p> $A = \frac{C}{B} \times 100 \%$ <p>Keterangan A = Persentase Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar Melakukan Pembayaran Pajak Daerah tahun yang dilaporkan B = Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar tahun yang dilaporkan C = Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan melakukan pembayaran tahun yang dilaporkan</p>	70%

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Penjelasan / FORM Perhitungan	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	1.1 Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	Perhitungan $\frac{\text{Jumlah KK yang diterbitkan sampai dengan tahun X}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga dalm satu wilayah sampai dengan tahun X}} \times 100 \%$ <p style="text-align: center;">(Penduduk kawin 2 + carai mati + cerai hidup + Kepala keluarga belum kawin)</p>	95.55%
		2 Rasio Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Perhitungan $\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah Penduduk wajib KTP}} \times 100 \%$	84.19%
		3 Rasio Kepemilikan Kutipan Akte Kelahiran	Perhitungan $\frac{\text{Jumlah kutipan akte kelahiran yang diterbitkan sampai dengan tahun X}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100 \%$	88.15%
		4 Cakupan penerbitan kutipan akte kematian	Perhitungan $\frac{\text{Jumlah kutipan akte kematian yang telah diterbitkan sampai dengan tahun X}}{\text{Jumlah Penduduk yang terjadi sampai dengan tahun X}} \times 100 \%$	65.68%

**CAMAT PONTIANAK UTARA
KOTA PONTIANAK**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Penjelasan / FORM Perhitungan	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik yang Prima Kepada Masyarakat	1 Nilai Kepatuhan pelayanan Publik	<p>a Penjelasan Indikator Kinerja berupa Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik ini menggunakan hasil pengukuran/survey oleh lembaga di luar Kecamatan/SKPD yakni Ombudsman.</p> <p>b Perhitungan Nilai Kepatuhan pelayanan publik didapat dari hasil pengukuran oleh lembaga lain diluar Kecamatan/SKPD yakni Ombudsman, yang mana nilai ini merupakan akumulasi dari penilaian terhadap komponen pelayanan publik mulai dari sarana dan prasarana pelayanan hingga pelaksanaan pelayanan (kecepatan dan ketepatan serta kenyamanan pelayanan)</p>	81%
2	Meningkatnya koordinasi Pembangunan Kecamatan dengan Masyarakat	1 Persentase hasil Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam forum SKPD dibidang Fisik dan Prasarana, Ekonomi, Sosial dan Budaya	<p>a Penjelasan Persentase hasil musrenbang tingkat kecamatan yang terakomodir dalam forum SKPD dicapai melalui perbandingan hasil musrenbang tingkat kecamatan bidang fisik dan prasaran, ekonomi serta sosial dan budaya yang diakomodir SKPD dengan hasil usulan musrenbang tingkat kecamatan bidang fisik dan prasaran, Ekonomi serta Sosial dan Budaya yang prioritas</p> <p>b Perhitungan</p> <p>* Fisik dan Prasarana</p> $\frac{\text{Hasil musrenbang tingkat kecamatan bidang fisik dan prasaran yang diakomodir SKPD}}{\text{Hasil usulan musrenbang tingkat kecamatan bidang fisik dan prasaran yang prioritas}} \times 100 \%$ <p>* Ekonomi</p> $\frac{\text{Hasil musrenbang tingkat kecamatan bidang ekonomi yang diakomodir SKPD}}{\text{Hasil usulan musrenbang tingkat kecamatan bidang ekonomi yang prioritas}} \times 100 \%$ <p>* Sosial Budaya</p> $\frac{\text{Hasil musrenbang tingkat kecamatan bidang sosial budaya yang diakomodir SKPD}}{\text{Hasil usulan musrenbang tingkat kecamatan bidang sosial budaya yang prioritas}} \times 100 \%$	82%
3	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	1 Persentase keterlibatan RT dalam kegiatan pembangunan di kecamatan	<p>a Penjelasan Persentase keterlibatan RT dalam kegiatan pembangunan di kecamatan didapat dari hasil membandingkan Jumlah RT yang ikut berpartisipasi` dalam kegiatan pembangunan di Kecamatan dengan Jumlah RT yang terlibat dalam kegiatan pembangunan di Kecamatan</p> <p>Persentase keterlibatan RT dalam kegiatan pembangunan di kecamatan didapat dari hasil membandingkan Jumlah RT yang ikut berpartisipasi` dalam kegiatan pembangunan di Kecamatan dengan Jumlah RT yang terlibat dalam kegiatan pembangunan di Kecamatan</p>	82%

		<p>b Perhitungan</p> <p>Jumlah RT yang ikut berpartisipasi` dalam kegiatan pembangunan di Kecamatan _____ X 100 %</p> <p>Jumlah RT yang terlibat dalam kegiatan pembangunan di Kecamatan</p> <p>* Gotong Royong</p> <p>Jumlah RT yang ikut berpartisipasi` dalam kegiatan gotong royong di Kecamatan _____ X 100 %</p> <p>Jumlah RT yang terlibat dalam kegiatan gotong royong di Kecamatan</p> <p>* Perayaan Hari Besar Daerah</p> <p>Jumlah RT yang ikut berpartisipasi` dalam kegiatan Perayaan Hari Besar Daerah di Kecamatan _____ X 100 %</p> <p>Jumlah RT yang terlibat dalam kegiatan Perayaan Hari Besar Daerah di Kecamatan</p> <p>* HUT RI</p> <p>Jumlah RT yang ikut berpartisipasi` dalam kegiatan HUT RI di Kecamatan _____ X 100 %</p> <p>Jumlah RT yang terlibat dalam kegiatan HUT RI di Kecamatan</p> <p>* Perlombaan Kecamatan dan Kelurahan</p>	
		<p>Jumlah RT yang ikut berpartisipasi` dalam kegiatan HUT RI di Kecamatan _____ X 100 %</p> <p>Jumlah RT yang terlibat dalam kegiatan HUT RI di Kecamatan</p> <p>* Inovasi Unggulan Kelurahan</p> <p>Jumlah RT yang ikut berpartisipasi` dalam kegiatan Inovasi Unggulan Kelurahan di Kecamatan _____ X 100 %</p> <p>Jumlah RT yang terlibat dalam kegiatan Inovasi Unggulan Kelurahan di Kecamatan</p> <p>* Database Kecamatan</p> <p>Jumlah RT yang ikut berpartisipasi` dalam kegiatan database Kecamatan di Kecamatan _____ X 100 %</p> <p>Jumlah RT yang terlibat dalam kegiatan Database Kecamatan di Kecamatan</p>	

4	Meningkatnya kesadaran hukum dan keamanan dan ketertiban masyarakat	1 Persentase menurunnya masalah pelanggaran keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang difasilitasi di Kecamatan	<p>a Penjelasan</p> <p>Persentase menurunnya masalah pelanggaran keamanan dan ketertiban masyarakat yang difasilitasi di Kecamatan dicapai melalui membandingkan jumlah realisasi kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan di kecamatan terhadap masalah keamanan dan ketertiban dengan Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan di kecamatan terhadap masalah keamanan dan ketertiban</p> $\frac{\text{Jumlah realisasi kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan di kecamatan terhadap masalah keamanan dan ketertiban}}{\text{Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan di kecamatan terhadap masalah keamanan dan ketertiban}} \times 100 \%$ <p>b Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah realisasi kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan di kecamatan terhadap masalah keamanan dan ketertiban}}{\text{Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan di kecamatan terhadap masalah keamanan dan ketertiban}} \times 100 \%$	91%
			<p>* PKL</p> $\frac{\text{Jumlah realisasi kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan di kecamatan terhadap masalah PKL}}{\text{Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan di kecamatan terhadap masalah PKL}} \times 100 \%$ <p>* Bangunan Liar</p> $\frac{\text{Jumlah realisasi kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan di kecamatan terhadap masalah Bangunan Liar}}{\text{Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan di kecamatan terhadap masalah Bangunan Liar}} \times 100 \%$	

5	Meningkatnya Penguatan lembaga sosial dan ekonomi masyarakat dan ekonomi masyarakat	1 Persentase lembaga sosial masyarakat yang berperan aktif dalam layanan sosial dasar di masyarakat	<p>a Penjelasan Yang dimaksudkan dengan persentase lembaga sosial masyarakat yang berperan aktif dalam layanan dasar masyarakat yakni lembaga lembaga sosial yang aktif dan responsif dalam mengedukasi masyarakat sehingga kemampuan masyarakat meningkat dicapai dengan membandingkan Jumlah realisasi kegiatan lembaga sosial yang dibina Kecamatan dengan Jumlah lembaga sosial yang aktif dan dibina Kecamatan</p> <p>b Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah realisasi kegiatan lembaga sosial yang dibina Kecamatan}}{\text{Jumlah lembaga sosial yang aktif dan dibina Kecamatan}} \times 100 \%$ <p>* PKK</p> $\frac{\text{Jumlah realisasi kegiatan PKK}}{\text{Jumlah PKK yang aktif dan dibina Kecamatan}} \times 100 \%$ <p>* Posyandu</p> $\frac{\text{Jumlah realisasi kegiatan Posyandu}}{\text{Jumlah Posyandu yang aktif dan dibina Kecamatan}} \times 100 \%$ <p>* LPTQ</p> $\frac{\text{Jumlah realisasi kegiatan LPTQ}}{\text{Jumlah LPTQ yang aktif dan dibina Kecamatan}} \times 100 \%$	82%
---	---	---	---	-----

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015
SEKRETARIAT DPRD
KOTA PONTIANAK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Penjelasan / FORM Perhitungan	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap kegiatan dan rapat-rapat DPRD	Jumlah terlaksananya agenda kedewanan sesuai ketetapan hasil rapat Badan Musyawarah		100%
		1 Rapat Internal Komisi		
		2 Rapat Gabungan Komisi		
		3 Rapat Paripurna Intern		
		4 Rapat Paripurna Istimewa		
		5 Rapat Badan Anggaran		
		6 Rapat Pimpinan bersama Ketua Praksi		
		7 Rapat Pimpinan DPRD		
		8 Rapat Pembentukan Peraturan Daerah		
		9 Rapat Badan Kehormatan		
		10 Rapat Panitia Khusus		
2	Meningkatnya kelancaran penyelesaian tugas-tugas DPRD	1 Jumlah Raperda yang dibahas		27 Raperda
		2 Jumlah Perda yang disahkan		17 Perda
		3 Jumlah Raperda yang dikaji		2 Raperda
		4 Jumlah Kegiatan Sosialisasi		18 Kali
		5 Jumlah Kegiatan Reses		3 Kali

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015
INSPEKTORAT
KOTA PONTIANAK**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Penjelasan / FORM Perhitungan	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Profesionalisme dan Kinerja Aparatur	1 Persentase Auditor memiliki sertifikasi yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan sebagai berikut : .- Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor .- Sertifikasi Audit Investigasi	a Penjelasan Indikator ini untuk mengukur penguatan APIP yang memiliki sertifikasi pemeriksaan tertentu yang dikeluarkan Badan Diklat: - Jabatan Fungsional Auditor - Audit investigasi - Probity Audit b Perhitungan $\frac{\text{Auditor yang memiliki sertifikasi pemeriksaan}}{\text{Auditor yang ada di inspektorak}} \times 100 \%$	25%
2	Meminimalisir terjadinya penyelewengan dan meningkatkan efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pembangunan	1 Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	a Penjelasan Indikator Kinerja ini adalah untuk mengukur Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti dengan cara membandingkan Persentase Kasus Pengaduan yang telah dilakukan pemeriksaannya (LHP) yang menghasilkan saran atau rekomendasi dengan Jumlah Kasus Pengaduan yang masuk baik yang telah maupun belum dilakukan pemeriksaannya Dasar yang digunakan untuk menilai Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kasus Pengaduan Masyarakat. Data diperoleh dengan membandingkan Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti (LHP) dengan Jumlah Pengaduan Masyarakat yang masuk. b Perhitungan $\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti (LHP)}}{\text{Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Masuk}} \times 100 \%$	100%
		2 Persentase SKPD hasil evaluasi SAKIP yang akuntabilitas Kinerja "Baik"	a Penjelasan Indikator Kinerja ini adalah untuk mengukur pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD yang akuntabilitas kinerjanya "Baik" dengan cara menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif instansi pemerintah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dasar yang digunakan untuk menilai laporan SAKIP adalah Permen PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Data diperoleh dengan membandingkan Persentase SKPD Hasil Evaluasi SAKIP yang akuntabilitas kinerjanya "Baik" dengan Jumlah SKPD hasil evaluasi Sedangkan persentase peningkatan adalah peningkatan jumlah SKPD yang akuntabilitas kinerjanya Baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. b Perhitungan $\frac{\text{Jumlah SKPD yang akuntabilitas kinerjanya Baik}}{\text{Jumlah SKPD hasil Evaluasi}} \times 100 \%$	92%

	<p>3 Persentase jumlah temuan Inspektorat Kota Pontianak yang selesai ditindak lanjuti sesuai rekomendasi</p>	<p>A Penjelasan</p> <p>Dasar Hukum</p> <p>1 Pasal 20 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:</p> <p>a Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.</p> <p>b Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil</p> <p>c Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.</p> <p>2 PMK No. 116 Tahun 2007 tentang Penyusunan Rencana Tindak dan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Pemerintah Terhadap Data diperoleh dengan membandingkan Persentase temuan yang ditindak lanjuti sesuai Rekomendasi dengan jumlah Rekomendasi</p> <p>Sedangkan persentase peningkatan adalah peningkatan persentase temuan yang ditindak lanjuti sesuai rekomendasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.</p> <p>B Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah temuan yang di TL sesuai rekomendasi}}{\text{Jumlah rekomendasi}} \times 100 \%$	<p>30%</p>
	<p>4 Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p>	<p>A Penjelasan</p> <p>Opini BPK merupakan pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.</p> <p>Opini BPK didasarkan pada kriteria antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 2. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures) 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan 4. Efektivitas Sistem Pengendalian Interen (SPI) 	<p>WTP</p>
		<p>Salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan dilihat dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komponennya meliputi: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah, Opini BPK secara bertingkat terdiri dari: Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of Opinion), Tidak Wajar (Adversed Opinion), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).</p> <p>Dampak dari diperolehnya opini selain WTP atas laporan keuangan pemerintah antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam menunjang keberhasilan program kerja pemerintah. 2 Timbulnya konotasi atau persepsi publik akan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah <p>Data diperoleh dengan membandingkan Opini BPK RI yang dicapai dengan Opini BPK RI yang ditargetkan</p> <p>Sedangkan persentase peningkatan adalah peningkatan opini BPK RI tahun yang dilaporkan dibandingkan dengan tahun sebelumnya</p> <p>B Perhitungan</p> $\frac{\text{Tingkat capaian tahun yang dilaporkan}}{\text{Tingkat capaian yang ditargetkan}} \times 100 \%$	

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PONTIANAK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Penjelasan / FORM Perhitungan	TARGET
1	2	3	4	5
1	Prima dalam pelayanan administrasi semakin meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta Profesionalisme Sumber Daya Aparatur	1 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	<u>Penjelasan</u> Akumulasi Persentase realisasi pemenuhan jasa surat menyurat, persentase realisasi pemenuhan kebutuhan komunikasi sumber daya air dan listrik, persentase realisasi kebutuhan sarana kebersihan kantor, persentase realisasi pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor, persentase realisasi pemenuhan kebutuhan instalasi listrik dan penerangan kantor, persentase realisasi pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, persentase realisasi pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman, persentase realisasi pemenuhan kebutuhan rapat-rapat koordinasi pengawasan dan pembinaan dalam daerah.	97%
2 Meningkatnya SDM Aparatur		<u>Penjelasan</u> Akumulasi persentase pemenuhan pendidikan dan pelatihan formal, persentase pemenuhan kebutuhan pakaian dinas dan perlengkapannya	80%	
3 Meningkatnya pengelolaan perencanaan kerja, monitoring dan evaluasi, keuangan dan aset secara tertib dan teratur		<u>Penjelasan</u> Akumulasi persentase realisasi pemenuhan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor, persentase realisasi pemeliharaan rutin berkala dinas/operasional, persentase realisasi pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor, persentase pemenuhan pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor, persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan, persentase realisasi pemenuhan penyusunan dokumen rencana kerja.	80%	
2	Terpenuhinya Kebutuhan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas serta dapat meningkatkan keterpaduan dan keselarasan pelaksanaan perencanaan pembangunan bagi seluruh stakeholder	1 Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku	<u>Penjelasan</u> Akumulasi persentase realisasi pemenuhan penyelenggaraan Musrenbang Penyusunan RKPD, persentase realisasi pemenuhan ketersediaan dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perkada, persentase realisasi pemenuhan ketersediaan dokumen KUA dan PPAS	80%
		2 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan ekonomi	<u>Penjelasan</u> Akumulasi persentase realisasi pemenuhan ketersediaan dokumen indikator ekonomi daerah, persentase realisasi pemenuhan ketersediaan laporan koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, persentase realisasi pemenuhan ketersediaan laporan fasilitasi pengendalian inflasi Daerah Kota Pontianak, persentase realisasi pemenuhan ketersediaan dokumen analisa PDRB Kecamatan se-Kota Pontianak, Persentase realisasi pemenuhan ketersediaan dokumen analisa input-output kota Pontianak, persentase realisasi pemenuhan ketersediaan dokumen perencanaan dan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi.	80%
		3 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan sosial dan budaya	<u>Penjelasan</u> Akumulasi persentase realisasi pemenuhan ketersediaan laporan koordinasi, perencanaan pembangunan bidang sosial budaya, persentase realisasi pemenuhan ketersediaan laporan pembinaan dan pendampingan PNPB Mandiri P2KP, persentase realisasi pemenuhan ketersediaan laporan sosialisasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Persentase realisasi pemenuhan ketersediaan laporan fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPD)	80%

		4	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan fisik dan prasarana	<p><u>Penjelasan</u></p> <p>Akumulasi persentase realisasi pemenuhan ketersediaan laporan koordinasi dan fasilitasi perencanaan bidang fisik dan prasarana, persentase realisasi pemenuhan ketersediaan laporan koordinasi dan fasilitasi bidang penataan ruang Daerah Kota Pontianak, persentase realisasi pemenuhan ketersediaan dokumen Rencana Induk Transportasi perkotaan, persentase realisasi pemenuhan ketersediaan laporan perencanaan jalan akses sebagai penunjang jalan lingkar luar di Pontianak utara, persentase realisasi ketersediaan dokumen pedoman analisa da,pak lalulintas di kota Pontianak, persentase realisasi pemenuhan ketersediaan dokumen perencanaan jalan kota berbasis web, persentase realisasi pemenuhan ketersediaan laporan evaluasi kinerja TPA sampah (batu layang)</p>	80%
3	Tersedianya data dan informasi yang akurat dalam penyusunan dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan yang didukung oleh sistem informasi melalui elektronik government	1	Meningkatnya pemantauan dan evaluasi kerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang secara efektif	<p><u>Penjelasan</u></p> <p>Akumulasi persentase realisasi pemenuhan ketersediaan laporan review dan evaluasi pelaksanaan MDG'S, persentase realisasi pemenuhan ketersediaan laporan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan, persentase realisasi pemenuhan ketersediaan laporan pertanggungjawaban Walikota Akhir Tahun (LKPJ)</p>	82%
		2	Meningkatnya ketersediaan sistem informasi dan data-data pembangunan yang mutakhir dan mudah diakses	<p><u>Penjelasan</u></p> <p>Persentase realisasi pemenuhan ketersediaan Laporan pemuktahiran sistem informasi pengelolaan jalan lingkungan kota berbasis web, persentase realisasi pemenuhan ketersediaan publikasi dan hasil-hasil pembangunan, persentase realisasi pemenuhan ketersediaan dokumen Profil Kota Pontianak, persentase realisasi pemenuhan ketersediaan laporan updating data dasar perencanaan pembangunan, persentase realisasi pemenuhan ketersediaan laporan pengembangan data perencanaan, persentase realisasi pemenuhan ketersediaan publikasi perencanaan pembangunan daerah, persentase realisasi pemenuhan ketersediaan laporan pemeliharaan dan pemuktahiran sistem informasi penyusunan hasil Musrenbang dan forum SKPD, persentase realisasi pemenuhan ketersediaan laporan pemeliharaan dan pemuktahiran sistem informasi e-Office berbasis Web, persentase realisasi pemenuhan ketersediaan laporan pemeliharaan dan pemuktahiran sistem monitoring dan Evaluasi kinerja Pembangunan Kota Pontianak, persentase realisasi pemenuhan ketersediaan laporan sistem Data Base dukungan kebijakan nasional (SDDKN), persentase realisasi pemenuhan ketersediaan laporan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD), persentase realisasi pemenuhan ketersediaan laporan pemeliharaan dan pemuktahiran Web Site Bapeda, persentase realisasi pemenuhan ketersediaan laporan pemuktahiran SIM RPJM Kota Pontianak, persentase realisasi pemenuhan ketersediaan laporan penyusunan Roadmad sistem inovasi daerah (SIDa)</p>	50%
4	Tersedianya data perencanaan pembangunan melalui pengkajian, penelitian dan perekayasa sebagai bahan penyusunan kebijakan oleh Kepala Daerah	1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan melalui pengkajian, penelitian dan perekayasa sehingga dapat diwujudkan kebijakan pembangunan yang efektif dan efisien	<p><u>Penjelasan</u></p> <p>Akumulasi Persentase realisasi pemenuhan ketersediaan Laporan fasilitasi kajian sial budaya ekonomi dan fisik prasarana, Persentase realisasi pemenuhan ketersediaan Laporan koordinasi penelitian dan pengembangan, Persentase realisasi pemenuhan ketersediaan Laporan studi dampak pengembangan wilayah terhadap perubahan tata guna lahan dan pengaruhnya peningkatan potensi banjir, persentase realisasi pemenuhan ketersediaan laporan studi dampak penyusunan guideline desain penataan fasad bangunan berbasis arsitektur lokal.</p>	85%

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA PONTIANAK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Penjelasan / FORM Perhitungan	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Profesionalisme dan Kinerja Aparatur	1 Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kopotensinya	Terpenuhinya Pegawai yang telah mengikuti pendidikan sesuai kompetensinya dengan Jenis Diklat Ujian Dinas, Ujian Dinas Penyesuaian Ijazah, Diklat Formal, Bimtek PNS, Bimtek CPNS, Diklat Prejabatan dan Diklat Penjurangan. Formulasi : $\frac{\text{Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat}}{\text{Jumlah Pegawai Yang Direncanakan mengikuti Diklat}} \times 100\%$	95%
		2 Persentase penyelesaian Pelayanan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP)	Terlaksananya Penyelesaian Pelayanan Kepegawaian yaitu Penerimaan Aparatur Sipil Negara, Perubahan status CPNS menjadi PNS, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Cuti, Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi, Jabatan Fungsional, Mutasi Pindah, Pemberhentian ASN(Pensiun), Perwakilan Jabatan, Administrasi KPE, Penyusunan Laporan DUK PNS, Pemeriksaan Psikologi dan Kesehatan, Karis/Karsu, Karpeg, Sumpah PNS. Formulasi : $\frac{\text{Jumlah Pelayanan Yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Permohonan Pelayanan Kepegawaian}} \times 100\%$	100%
		3 Persentase Penurunan Jumlah Pegawai yang melakukan Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara	Terpenuhinya Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Pegawai. Formulasi : $\frac{\text{Jumlah Pegawai yang Melanggar Disiplin}}{\text{Jumlah Keseluruhan Pegawai}} \times 100\%$	0.28%
		4 Persentase Pegawai yang berkinerja baik dengan nilai SKP lebih dari atau sama dengan 76	Terpenuhinya Penyelesaian Sasaran Kinerja Pegawai dengan Nilai lebih dari atau sama dengan tujuh puluh enam (76). Formulasi : $\frac{\text{Jumlah Pegawai dengan SKP Baik}}{\text{Jumlah Keseluruhan Pegawai}} \times 100\%$	100%

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PONTIANAK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Penjelasan / FORM Perhitungan	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat tidak mampu	1 Persentase peningkatan pendapatan masyarakat kurang mampu yang dibantu	A Perhitungan $\frac{\text{Pendapatan masy. stlh dibantu} - \text{Pendapatan masy. sebelum dibantu}}{\text{Pendapatan masyarakat sebelum dibantu}} \times 100\%$ <p>Keterangan Pendapatan masyarakat yang dihitung hanya masyarakat yang mendapatkan bantuan</p>	21.8%
2	Meningkatkan perlindungan terhadap pertempuan dan anak	1 Cakupan Kasus KDRT yang ditangani		196 kasus
		2 Kategori Responsif Gender (KRG)	A Penjelasan Kategori responsif gender ada 3, yakni pratama, madya & utama (responsif). Kategori tersebut diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Pertama
		3 Kategori Kota Layak Anak	A Penjelasan Kategori kota layak anak terdiri dari tingkatan Pratama, Madya, Nindya, Utama dan KLA. Kategori tersebut diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan.	Nindya
3	Terwujudnya keluarga berkualitas melalui keluarga berencana dan keluarga sejahtera	1 Persentase jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang ikut ber- KB	A Perhitungan $\frac{\text{Jumlah PUS yang ber KB}}{\text{Jumlah seluruh PUS di Kota Pontianak}} \times 100\%$	72.5%

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA PONTIANAK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Penjelasan / FORM Perhitungan	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya pelayanan investasi yang efektif dan efisien	1.1 Persentase pelayanan investasi yang berkualitas	<p>a. Penjelasan</p> <p>Pelayanan Penanaman Modal adalah pemberian segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang diterbitkan oleh pemerintah sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan yang dilayani adalah pelayanan perizinan dan non perizinan bidang Penanaman Modal berupa Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), perpanjangan dan Izin Memperkerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA) yang bekerja di kota Pontianak.</p> <p>b. Cara Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani}}{6} \times 100 \%$	75%
2	Terwujudnya pelayanan perizinan teknis daerah yang mudah, cepat, transparan dan akuntabel	1 Persentase pelayanan perizinan penanaman modal dan perizinan teknis daerah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	<p>a. Penjelasan</p> <p>Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 19 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada BP2T Kota Pontianak dimana pelayanan perizinan dan non perizinan harus dilayani dengan cepat, mudah, murah, transparan, dan akuntabel yang merupakan prinsip yang harus di kedepankan oleh setiap penyelenggara pelayanan perizinan dengan memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis layanan. Data ini dapat diperoleh melalui laporan pelayanan perizinan teknis</p>	85%

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PONTIANAK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Penjelasan / FORM Perhitungan	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bencana dan bahaya kebakaran	1.1 Persentase peningkatan tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	<p>A Penjelasan</p> <p>Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dimulai saat menerima informasi sampai tiba di tempat kejadian kebakaran, yang langsung melakukan tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda, dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.</p> <p>* Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK</p> $\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100 \%$ <p>* Persentase peningkatan tingkat waktu tanggap</p> $\frac{\text{Tingkat waktu tanggap tahun yang dilaporkan} - \text{Tingkat waktu tanggap tahun sebelumnya}}{\text{Tingkat waktu tanggap tahun sebelumnya}} \times 100 \%$	80%
		2 Persentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi	<p>A Penjelasan</p> <p>Kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi adalah semua kejadian bencana di wilayah kota Pontianak, baik kebakaran gedung, perumahan, lahan, puting beliung, banjir dan lain-lain yang mendapatkan penanganan dari BPBD Kota Pontianak</p> $\frac{\text{Jumlah korban yang mendapatkan bantuan kebutuhan dasar}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100 \%$	80%
2	Meningkatnya pelayanan, penanganan dan penanggulangan bencana yang berkualitas dan profesional	1 Persentase terdatanya peristiwa bencana dan terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana	<p>A Penjelasan</p> <p>Adalah jumlah korban bencana yang mendapatkan bantuan berupa kebutuhan dasar pasca terjadinya bencana, yaitu berupa makanan instan, selimut, pakaian bayi, dan lain-lain.</p> $\frac{\text{Jumlah korban yang mendapatkan bantuan kebutuhan dasar}}{\text{Jumlah korban yang tertimpa bencana}} \times 100 \%$	60%

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PONTIANAK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Penjelasan / FORM Perhitungan	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya penyusunan PERDA/PERWA APBD dan APBD-P tepat waktu	1 Tingkat ketepatan waktu Penetapan PERDA/PERWA tentang penjabaran APBD dan APBD-P	Penetapan PERDA/PERWA tentang Penjabaran APBD ≤ tanggal 31 Desember untuk pelaksanaan PERDA/PERWA tahun yang akan datang. Sedangkan untuk APBD-P ≤ 30 Oktober.	≤ 31 desember ≤ 30 oktober
2	2 Terwujudnya penyampaian Laporan Keuangan seluruh SKPD tepat waktu	1 Persentase seluruh SKPD yang penyampaian Laporan Keuangan seluruh SKPD tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu}}{\text{Jumlah SKPD yang menyampaikan laporan keuangan}} \times 100\%$	100%
3	Terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah (SAP)	1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah (SAP)	Pernyataan oleh BPK RI	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
		2 Persentase kepatuhan SKPD terhadap peraturan Perundang-undangan dalam Pengolahan Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah	Pernyataan oleh BPK RI	100%

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA PONTIANAK**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Penjelasan / FORM Perhitungan	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya apresiasi seni dan budaya daerah	1 Persentase meningkatnya partisipasi dan apresiasi masyarakat akan pertunjukan seni dan budaya	<p>Partisipasi adalah peran serta orang/kelompok dan orang dalam kegiatan seni Budaya kota Pontianak yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Pontianak dalam pagelaran seni budaya.</p> <p>Persentase meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam kegiatan seni budaya adalah Persentase meningkatnya kelompok dan orang yang berperan serta dalam kegiatan seni budaya tahun berjalan (Tahun 2014) dibandingkan tahun sebelumnya (tahun 2013)</p> <p>Perhitungan Rumus</p> $\frac{\text{Jumlah Apresiasi Tahun 2014} - \text{Jumlah Apresiasi Tahun 2013}}{\text{Jumlah Apresiasi Tahun 2013}} \times 100 \%$ <p>Jumlah Kelompok yang berpartisipasi Tahun 2013 = 130 Jumlah Kelompok yang berpartisipasi tahun 2014 = 380</p> <p>Perhitungan Rumus</p> $\frac{380 - 130}{130} \times 100 \% = 192\%$ <p>Kesimpulan : Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat akan kegiatan seni dan budaya daerah Kota Pontianak sebesar 192%</p> <p>Apresiasi adalah Jumlah kunjungan masyarakat dalam kegiatan seni budaya kota Pontianak yang akan Persentase meningkatnya Apresiasi adalah Persentase meningkatnya kunjungan masyarakat dalam kegiatan seni</p> <p>Perhitungan Rumus</p> $\frac{\text{Jumlah Apresiasi Tahun 2014} - \text{Jumlah Apresiasi Tahun 2013}}{\text{Jumlah Apresiasi Tahun 2013}} \times 100 \%$ <p>Jumlah Apresiasi masy. dlm kegiatan seni budaya Tahun 2013 = 7.650 Jumlah Apresiasi masy. dlm kegiatan seni budaya Tahun 2014 = 8.125</p> $\frac{8.125 - 7.650}{7.650} \times 100 \% = 6,21\%$ <p>Kesimpulan : Persentase meningkatnya Apresiasi Masyarakat akan kegiatan seni dan budaya daerah Kota Pontianak pada tahun 2014 sebesar 6.21%</p>	20%

<p>2 Jumlah karya budaya yang diaktualisasikan kembali oleh masyarakat</p>	<p>A Penjelasan</p> <p>Karya adalah Hasil ciptaan yang bukan saduran, salinan atau terjemahan, budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi, jadi Karya Budaya adalah Hasil ciptaan yang bukan saduran yang dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. aktualisasi adalah Terbaru, berdasarkan kenyataan yang sangat digemari dan sedang jadi pembicaraan.</p> <p>Persentase karya budaya yang diaktualisasikan kembali oleh masyarakat adalah Persentase karya budaya masyarakat yang digali dan dikembangkan kembali dibandingkan dengan karya budaya yang ada</p> <p>B Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah karya budaya masyarakat yang diaktualisasikan}}{\text{Jumlah karya budaya masyarakat yang ada}} \times 100 \%$ <p>Jumlah Karya budaya Masyarakat yang diaktualisasikan = 9 Jumlah Karya budaya Masyarakat yang ada = 10</p> $\frac{9}{10} \times 100 \% = 90\%$ <p>Kesimpulan : Persentase karya budaya yang diaktualisasikan kembali oleh masyarakat Tahun 2014 dengan Karya Budaya yang ada, sebesar 90 %</p>	<p>20%</p>
<p>3 Persentase benda, situs, dan kawasan cagar</p>	<p>A Penjelasan</p> <p>Benda, situs dan kawasan cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, Dilestarikan adalah Dijaga, Dirawat, Dipelihara, Dikembangkan namun tetap seperti keadaan semula, tidak berubah, bertahan dan kekal.</p> <p>Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang di lestarikan adalah Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya dilestarikan dibandingkan dengan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang ada</p>	<p>20%</p>
	<p>B Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang di lestarikan}}{\text{Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang ada}} \times 100 \%$ <p>Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang di lestarikan = 8 Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang ada = 17</p> $\frac{8}{17} \times 100 \% = 47\%$	

			<p>Kesimpulan :</p> <p>Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Tahun 2014 dengan benda, Situs dan Kawasan Budaya yang ada, sebesar 47 %</p>	
2	Meningkatnya kualitas pariwisata dengan memanfaatkan potensi daerah	1	<p>Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan Domestik</p> <p>Wisatawan adalah Orang yang berpergian ke suatu tempat dengan tujuan bertamasya yang terdiri dari wisatawan Domestik.</p> <p>Wisatawan domestik adalah orang yang berasal dari dalam negeri,</p> <p>Kunjungan adalah prihal (perbuatan, proses hasil) mengunjungi berkunjung lawatan</p> <p>Persentase Kunjungan Wisatawan Domestik adalah Persentase kunjungan wisatawan yang berkunjung dibandingkan dengan yang ditargetkan</p> $\frac{\text{Wisatawan Domestik yang berkunjung}}{\text{Wisatawan Domestik yang ditargetkan}} \times 100 \%$ <p>Jumlah Domestik yang berkunjung = 503.529 Jumlah Domestik yang ditargetkan = 518.420</p> <p>Perhitungan Rumus</p> $\frac{503.529}{518.420} \times 100 \% = 97.13\%$ <p>Kesimpulan :</p> <p>Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik pada tahun 2014 dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 97.13%</p>	20%
		2	<p>Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara</p> <p>Wisatawan Mancanegara adalah wisatawan yang berasal dari luar negeri yang mengadakan perjalanan ke daerah .</p> <p>Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan manca negara yang berkunjung dibandingkan dengan yang ditargetkan.</p> <p>Perhitungan Rumus</p> $\frac{\text{Wisatawan Manca Negara yang berkunjung}}{\text{Wisatawan Manca Negara yang ditargetkan}} \times 100 \%$	20%
			<p>Wisatawan Domestik yang berkunjung = 35,403 Jumlah Wisatawan Domestik yang ditargetkan = 59,318</p> $\frac{35,403}{59,316} \times 100 \% = 59,316\%$ <p>Kesimpulan :</p> <p>Persentase kunjungan Wisatawan Mancanegara pada tahun 2014 dari yang ditargetkan sebesar 59,64%</p>	

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015
DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA PONTIANAK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Penjelasan / FORM Perhitungan	TARGET
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan prasarana jalan dan jembatan yang representatif	1 Jumlah jembatan dengan kondisi baik	<p>a Perhitungan Rumus</p> $\frac{JJB}{JDB} \times 100 \%$ <p>* JJB : Jumlah Jembatan kondisi baik atau secara teknis layak digunakan * JDB :Jumlah jembatan keseluruhan berdasarkan database</p>	3 buah
		2 Panjang jalan dengan kondisi baik	<p>a Perhitungan Rumus</p> $\frac{PJB}{PDB} \times 100 \%$ <p>* PJB : Panjang jalan dalam kondisi baik * PDB : Panjang jalan keseluruhan berdasarkan database</p>	203.703 buah
2	Meningkatnya saluran/drainase dengan konstruksi yang baik dan memadai	1 Panjang saluran dranaise dengan kondisi baik	<p>a Perhitungan Rumus</p> $\frac{PSB}{PSDB} \times 100 \%$ <p>* PSB : Panjang Saluran dalam kondisi baik * PSDB : Panjang saluran keseluruhan berdasarkan database</p>	203.223 km
		2 Menurunnya lama genangan	<p>a Perhitungan Rumus</p> $\frac{\Delta Ws \text{ Waktu setelah normalisasi}}{\Delta Wb \text{ Waktu sebelum normalisasi}} \times 100 \%$ <p>* Δ Ws : Waktu yang terjadi pada waktu hujan setelah kegiatan normalisasi saluran * Δ Wb : Data waktu yang ada sebelum kegiatan normalisasi</p>	3 jam

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015
DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN PERUMAHAN
KOTA PONTIANAK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Penjelasan / FORM Perhitungan	TARGET
1	2	3	4	5
1	Menciptakan kualitas lingkungan kota yang asri dan tertata dengan baik	1 Presentase gedung Pemerintah berkondisi baik sesuai dengan ketentuan yang menjadi kewenangan Cipta Karya	A Penjelasan Adalah Jumlah Gedung Pemerintah Kota yang berkondisi baik yang ada di Kota Pontianak B Perhitungan Rumus $\frac{\text{Jumlah Gedung Pemkot Kondisi Baik}}{\text{Jumlah seluruh Gedung Pemkot}} \times 100 \%$	50%
2	Menciptakan Sanitasi Perkotaan yang ideal	1 Bertambahnya rumah tangga yang bersanitasi	A Penjelasan Bertambahnya Rumah tangga yang bersanitasi B Perhitungan Rumus Jumlah seluruh rumah yang bersanitasi pada kurun waktu tertentu ditambah dengan jumlah rumah tangga yang bersanitasi yang ditangani pada kurun waktu tertentu	100%
3	Menciptakan kualitas lingkungan hidup yang asri dan ditata dengan baik	1 Jumlah ketersediaan peraturan perencanaan detail/ teknis penataan ruang	a. Penjelasan Tersedianya Peraturan Perencanaan Detail/Teknis Penataan Ruang b. Jumlah Peraturan Perencanaan Detail/Teknis Penataan Ruang c. Jumlah Peraturan Perencanaan Detail/Teknis Penataan Ruang sebanyak 1 buah Dokumen Kesimpulan : Tersedianya Peraturan Perencanaan Detail/Teknis Penataan Ruang	100%
		2 Prosentase pelanggaran tata ruang yang ditindaklanjuti	A Penjelasan Pelayanan yang responsif adalah bentuk pelayanan yang tanggap,cepat,dan benar terhadap permasalahan yang diadukan oleh masyarakat.Pelanggaran di Bidang Pengawasan dan Pengendalian adalah ketidak sesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang, dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang,dan/atau menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh Peraturan perundang-undangan sebagai milik umum B Perhitungan Rumus $\frac{\text{Pelanggaran yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Pelanggaran}} \times 100 \%$	91%

4	Terwujudnya penataan kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni	1	Berkurangnya luas kawasan kumuh perkotaan	<p>A Penjelasan</p> <p>Kawasan kumuh adalah Kawasan permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan,kepadatan dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.</p> <p>B Perhitungan Rumus</p> <p>Jumlah seluruh luasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan oleh Walikota dikurangi Jumlah kumulatif kawasan kumuh permukiman yang telah ditangani</p> <p>C Contoh</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Kawasan Kumuh perkotaan adalah 81,66 Ha • Jumlah luas kawasan kumuh yang ditangani sebesar 17 Ha <p>Maka luas kawasan kumuh berkurang menjadi 81,66 Ha – 17 Ha = 64,66 Ha</p> <p>Kesimpulan : Maka luasan kumuh berkurang menjadi 64,66 Ha</p>	15%
		2	Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni	<p>A Penjelasan</p> <p>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni adalah rumah yang tidak memenuhi kriteria kehandalan bangunan, serta kesehatan serta kecukupan luas minimum disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu</p> <p>B Perhitungan Rumus</p> <p>Jumlah seluruh rumah pada kurun waktu tertentu dikurangi jumlah rumah tidak layak huni yang ditangan</p> <p>C Contoh</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Seluruh rumah yang ada di kota Pontianak 150.000 rumah • Jumlah Rumah tidak layak huni yang ditangani sebanyak 1000 rumah • Maka Jumlah Rumah tidak layak huni berkurang menjadi 150.000 rumah – 1000 rumah adalah 149.000 rumah <p>Kesimpulan : Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni dari 150.000 rumah menjadi 149.000 rumah</p>	15%
		3	Bertambahnya jumlah jalan lingkungan dengan kondisi baik	<p>A Penjelasan</p> <p>Jalan Lingkungan dengan kondisi baik disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu</p> <p>B Perhitungan Rumus</p> <p>Jumlah Jalan Lingkungan yang ditangani pada kurun waktu tertentu ditambah dengan jumlah seluruh jalan Lingkungan yang ada dengan kondisi baik</p> <p>C Contoh</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Jalan lingkungan yang ditangani sebanyak 200 jalan lingkungan pada kurun waktu tertentu • Jumlah seluruh jalan lingkungan yang ada dengan kondisi baik 1500 jalan lingkungan • Maka jumlah jalan lingkungan dengan kondisi baik bertambah menjadi 1700 jalan lingkungan lingkungan <p>Kesimpulan : Maka jalan lingkungan yang berkondisi baik bertambah dari 1500 jalan lingkungan lingkungan menjadi 1700 jalan lingkungan</p>	15%

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK
KOTA PONTIANAK**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Penjelasan / FORM Perhitungan	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan pemahaman tentang wawasan kebangsaan	1 Persentase meningkatnya keharmonisan hidup bermasyarakat	A Penjelasan Tingkat kerukunan hidup umat beragama ditandai dengan tidak adanya isu konflik diantara sesama umat beragama. Masing-masing umat beragama saling menghargai dan menjalankan ibadah agama dan kepercayaan masing-masing tanpa ada gangguan dari umat beragama yang lain.	75%
2	Meningkatkan stabilitas politik daerah yang lebih kondusif	1 Persentase meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan dini masyarakat	A Penjelasan Tingkat partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif yang ditandai dengan menurunnya tingkat gangguan kamtibmas	80%

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015
RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE
KOTA PONTIANAK**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Penjelasan / FORM Perhitungan	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kepuasan pasien.	1 Prosentase Indeks Kepuasan Pasien	A Penjelasan Kepuasan adalah pernyataan tentang persepsi pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan B Perhitungan Rumus Jumlah kumulatif rerata penilaian kepuasan pasien yang di survei disuatu unit pelayanan x 100% Jumlah unit pelayanan yang disurvei	≥ 70%
		2 Angka Pasien Pulang Paksa	A Penjelasan Pulang paksa adalah pulang atas permintaan pasien atau keluarga pasien sebelum diputuskan boleh pulang oleh dokter B Perhitungan Rumus Jumlah pasien pulang paksa dalam suatu periode Jumlah seluruh pasien yang dirawat dalam suatu periode	≤ 5%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit	1 Cakupan efisiensi pelayanan rumah sakit a. BOR (Bed Occupancy Rate)	A Penjelasan Prosentase pemakaian tempat tidur pada satu waktu tertentu B Perhitungan Rumus Jumlah hari perawatan x 100 % Jumlah Tempat Tidur x Jumlah hari dalam satu periode	60-65%
		b. BTO (Bed Turn Over)	A Penjelasan Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode B Perhitungan Rumus Jumlah Pasien Keluar (Hidup + Mati) Jumlah tempat tidur	40-50 kali
		c. TOI (Turn Over Interval)	A Penjelasan Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya B Perhitungan Rumus (Jumlah TTxPeriode)-Hari Perawatan Jumlah Pasien Keluar (Hidup + Mati)	1-3 hari
		d. AVLOS(Average Length Of Stay)	A Penjelasan Rata-rata lama rawat seorang pasien B Perhitungan Rumus Jumlah Lama dirawat Jumlah Pasien Keluar (Hidup + Mati)	6-9 hari
		e. GDR (Gross Death Rate)	A Penjelasan Angka kematian umum untuk setiap 1000 pasien keluar B Perhitungan Rumus	< 45%

			$\frac{\text{Jumlah pasien mati seluruhnya}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}} \times 1000 \%$	
		f. NDR (Net Death Rate)	<p>A Penjelasan Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar.</p> <p>B Perhitungan Rumus $\frac{\text{Jumlah pasien mati >48 jam dirawat}}{\text{Jumlah Pasien Keluar (Hidup + Mati)}} \times 1000 \%$ </p>	< 25%
3	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana rumah sakit	1 Cakupan pemenuhan alat kesehatan	<p>A Penjelasan Jenis dan jumlah peralatan kesehatan yang harus dimiliki rumah sakit sesuai standar yang telah ditetapkan.</p> <p>B Perhitungan Rumus <u>Jumlah alkes yang ada</u> Jumlah alkes sesuai standar </p>	80%
		2 Jumlah tempat tidur RS	<p>A Penjelasan Jumlah tempat tidur yang harus dimiliki rumah sakit sesuai standar</p> <p>B Perhitungan Rumus <u>Jumlah TT</u> Jumlah TT sesuai standar </p>	120.
		3 Akreditasi RS	<p>A Penjelasan Akreditasi rumah sakit merupakan suatu proses dimana lembaga independen (KARS) melakukan asesmen terhadap rumah sakit. Akreditasi diperlukan sebagai cara efektif untuk mengevaluasi mutu suatu rumah sakit yang sekaligus berperan sebagai sarana manajemen.</p> <p>B Perhitungan Rumus Cara perhitungan akreditasi rumah sakit tingkat dasar ada 2 jenis, yaitu : a. Golongan Bab Major, terdiri dari : - Bab Sasaran keselamatan pasien rumah sakit, nilai minimum 80% - Bab Hak pasien dan keluarga (HPK) , nilai minimum 80% - Bab Pendidikan pasien dan keluarga (PPK) , nilai minimum 80% - Bab Peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP) , nilai minimum 80% b. Golongan Bab Minor, terdiri dari : - Bab Millenium Development Goal's (MDG's), nilai minimum 20%. - Bab akses pelayanan dan kontinuitas pelayanan (APK), nilai minimum 20%. - Bab Asesmen Pasien (AP), nilai minimum 20%. - Bab Pelayanan pasien (PP)), nilai minimum 20%. - Bab Pelayanan anastesi dan bedah (PAB)), nilai minimum 20%. - Bab Manajemen penggunaan obat (MPO)), nilai minimum 20%. - Bab Manajemen komunikasi dan informasi (MKI)), nilai minimum 20%. - Bab Kualifikasi dan pendidikan staf (KPS)), nilai minimum 20%. - Bab Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), nilai minimum 20%. - Bab Tata kelola, kepemimpinan dan pengarahan (TKP), nilai minimum 20%. - Bab Manajemen fasilitas dan keselamatan (MFK)), nilai minimum 20% </p>	Bimbingan
4	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas tinggi	1 Prosentase dokter bersertifikat ACLS dan ATLS	<p>A Penjelasan Jumlah dokter yang memiliki sertifikat ACLS & ATLS ACLS : kompetensi dokter dalam penanganan kegawatdaruratan kardiologi (jantung) tingkat lanjut. ATLS : kompetensi dokter dalam penanganan traumatic tingkat lanjut.</p>	80%

			B Perhitungan Rumus <u>Jumlah dokter yg memiliki sertifikat ACLS & ATLS</u> Jumlah dokter yang ada	
		2 Prosentase perawat bersertifikat BTLS	A Penjelasan Jumlah perawat yang memiliki sertifikat BTLS. BTLS : kompetensi tenaga perawat dalam penanganan gawat darurat jantung dan traumatic. B Perhitungan Rumus <u>Jumlah perawat yg memiliki sertifikat BTLS</u> Jumlah perawat yang ada	80%
		3 Jumlah dokter spesialis	A Penjelasan Jumlah dokter spesialis di RSUD Kota Pontianak B Perhitungan Rumus Total dokter spesialis yang ada di RSUD Kota Pontianak	13 orang
5	Meningkatnya tertib pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian dan kerumahaan rumah sakit	1 Pelayanan administrasi yang tepat waktu	A Penjelasan B Perhitungan Rumus	100%
		2 Pelayanan administrasi yang mudah dan jelas	A Penjelasan B Perhitungan Rumus	100%
		3 Tata kelola pengarsipan surat dan dokumen yang mudah dan jelas	A Penjelasan B Perhitungan Rumus	100%
		4 Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	A Penjelasan Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi adalah pelaksanaan tindak lanjut yang harus dilakukan oleh peserta pertemuan terhadap kesepakatan atau keputusan yang telah diambil dalam pertemuan tersebut sesuai dengan permasalahan pada bidang masing-masing B Perhitungan Rumus <u>Hasil keputusan pertemuan direksi yang ditindaklanjuti dalam satu bulan</u> Total hasil keputusan yang harus ditindaklanjuti dalam satu bulan	100%
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan rumah sakit	1 Laporan Akuntabilitas kinerja rumah sakit	A Penjelasan Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban rumah sakit untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggung jawaban secara periodik.	100%

		B Perhitungan Rumus <u>Laporan akuntabilitas kinerja yang lengkap dan dilakukan minimal 3 bulan dalam satu tahun</u> Jumlah laporan akuntabilitas yang seharusnya disusun dalam satu tahun	
2	Capaian pendapatan sesuai dengan target	A Penjelasan B Perhitungan Rumus	100%
3	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	A Penjelasan Ketepatan waktu pemberian imbalan sesuai kesepakatan waktu adalah waktu pembayaran imbalan yang tidak melampaui batas waktu yang telah ditetapkan. B Perhitungan Rumus <u>Jumlah bulan pemberian insentif tepat waktu</u> Jumlah bulan sesuai periode analisis	100%
4	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	A Penjelasan B Perhitungan Rumus	100%

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015
KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
KOTA PONTIANAK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Penjelasan / FORM Perhitungan	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	1 Presentase ketersediaan energi dan protein per kapita	<p>A Penjelasan</p> <p>Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kualitas, kuantitas, keragaman dan keamanannya</p> <p>* Angka kecukupan gizi (AKG) ditetapkan di Indonesia setiap lima (5) tahun sekali melalui forum Widyakarya Nasional pangan dan Gizi (WKNPG) salah satu rekomendasi WKNPG ke VIII tahun 2004 menetapkan tingkat ketersediaan energy sebesar 2,200 Kkal/Kapita/Hari</p> <p>B Perhitungan Rumus</p> <p>Penyediaan pangan terdiri komponen produksi, perubahan stok, import dan ekport</p> $\frac{\text{Ketersediaan pangan/Kapita/Hari} \times \text{Kandungan kalori} \times \text{BDD}}{100} \times 100\%$ $\frac{\text{Ketersediaan pangan/Kapita/Hari} \times \text{Kandungan protein} \times \text{BDD}}{100} \times 100\%$	90%
		2 Presentase peningkatan skor pola pangan harapan	<p>A Penjelasan</p> <p>Indikator Skor Pola pangan Harapan (PPH)</p> <p>* Penyediaan informasi penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi dan berimbang sesuai standar kecukupan energy dan protein per kapita per hari (PPH).</p> <p>* Peningkatan KAP (Knowledge, Attitude, Practice) konsumsi pangan pada masyarakat tentang pangan local, teknologi pengolahan pangan, pemanfaatan lahan pekarangan dan penguatan kelembagaan</p> <p>* Cara Perhitungan Rumus :</p> <p>Nilai capaian peningkatan Skor PPH adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energy dan zat gizi lainnya, dimana dengan semakin tinggi skor PPH, maka konsumsi pangan semakin beragam bergizi dan seimbang</p> $\frac{\text{Energi masing-masing komoditas}}{\text{Angka Kecukupan Gizi}} \times 100\%$	90%
		3 Presentase peningkatan mutu dan kewanamanan pangan	<p>A Penjelasan</p> <p>a Penyediaan informasi tentang keamanan pangan, khususnya pangan segar :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prima 3 (P3) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi. - Prima 2 (P2) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan bermutu baik. - Prima 1 (P1) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan bermutu baik serta cara produksinya ramah terhadap lingkungan. <p>b Koordinasi dengan instansi terkait tentang pengendalian, pengawasan dan monitoring peredaran bahan kimia berbahaya yang disalahgunakan untuk pangan.</p> <p>c Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan terhadap UMKM pangan.</p> <p>d Peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan di sekolah</p> <p>e Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar</p>	80%

	<p>f Pembinaan dan pengawasan produk pabrikan skala kecil/rumah tangga.</p> <p>B Perhitungan Rumus</p> $\frac{\text{air .Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi}}{\text{Jumlah total sampel pangan yangdiambil di pedagang}} \times 100 \%$	
<p>4 Presentase ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah</p>	<p>A Penjelasan</p> <p>Ketersediaan Informasi pasokan harga,akses pangan :</p> <p>a Adalah kumpulan data harga pangan,pasokan pangan,dan akses pangan yang dipantau dan dikumpulkan secara rutin atau priodik, untuk dapat menyediakan data dan informasi mencakup komoditas : Gabah/beras, jagung,kedele,daging sapi,daging ayam,telur,minyak goreng,gula pasir,cabe merah yang disajikan dalam periode</p> <p>b Data harga dari hasil pengumpulan data/pemantauan instansi Ketahanan pangan Kabupaten/Kot</p> <p>B Perhitungan Rumus</p> <p>Rumus Capaian ketersediaan informasi harga,pasokan dan akses pangan</p> $K = \frac{\sum_{i=1}^n K_i}{3}$ <p>Rumus Ketersediaan informasi menurut I (I =1,2,3)</p> $K = \frac{\sum_{j=1}^n (\text{Realisasi } (j) \times 100 \%)}{\text{Target } (j)}$ <p>Keterangan ;</p> <p>a K_i = Ketersediaan informasi menurut i Dimana : 1 = 1 = Harga I = 2 = Pasokan I = 3 = Akses</p> <p>b Realisasi (J) = Banyaknya Informasi yang terealisasi pengumpulannya menurut J, dimana : J = 1 = Komoditas, J = 2 = Lokasi J = 3 = Waktu. Target (J) = Sasaran banyaknya Informasi yang akan dikumpulkan menurut J. dimana J = 1 = Komoditas, J = 2 = Lokasi, J = 3 = Waktu, Target Komoditas, target lokasi (Kabupaten/Kota, kecamatan,Desa) dan target waktu pengumpulan informasi (Mingguan/Bulanan) ditentukan masing-masing daerah sesuai dengan sumber dana dan kemampuan SDM yang dimiliki oleh masing-masing daerah.</p>	<p>90%</p>

<p>5 Presentase stabilitas harga dan pasokan pangan</p>	<p>A Penjelasan Stabilitas Harga dan pasokan pangan</p> <p>a Harga dinyatakan tabil jika gejala harga pangan disuatu wilayah kurang dari 25 % dari kondisi Normal</p> <p>b Pasokan pangan dinyatakan stabil jika penurunan pasokan pangan disuatu wilayah berkisar antara 5 % - 40 %</p> <p>B Perhitungan Rumus</p> $SK = \frac{\sum_{i=1}^N SK_i}{n}$ <p>Keterangan : K = H = Untuk Harga P = Untuk Pasokan SHi = Stabilitas Harga Komoditas ke i SPi = Stabilitas Pasokan komoditas ke i.</p> <p>I = 1,2,3 ... n N = Jumlah Komoditas, dimana : Stabilitas Harga (SH) digambarkan dengan koefisien keragaman (CV) Stabilitas pasokan (SP) digambarkan dengan koefisien keragaman (CV)</p>	<p>90%</p>
<p>6 Presentase penguatan cadangan pangan</p>	<p>A Penjelasan Cadangan pangan Pemerintah</p> <p>* Tersediannya cadangan pangan pemerintah di tingkat Kabupaten/Kota minimal sebesar 100 Ton ekuivalen beras.</p> <p>* Adanya lembaga cadangan pangan pemerintah pada setiap Provinsi dan Kabupaten/kota. Tersediannya cadangan pangan pemerintah, minimal 25 Ton ekuivalen beras</p> <p>B Perhitungan Rumus</p> $\frac{\text{Jumlah Cad. Pangan Kab./ Kota}}{100 \text{ ton}} \times 100 \%$	<p>60%</p>
<p>7 Jumlah penanganan daerah rawan pangan</p>	<p>A Penjelasan Penanganan rawan pangan dilakukan pertama melalui pencegahan kerawanan pangan untuk menghindari terjadinya rawan pangan disuatu wilayah sedini mungkin dan kedua melakukan penanggulangan kerawanan pangan pada daerah yang rawan kronis melalui program-program sehingga rawan pangan diwilayah tersebut dapat dapat ditangani, dan penanggulangan daerah rawan transien melalui bantuan social .</p> <p>a Pencegahan rawan pangan melalui yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pengembangan Sistim Kewaspadaan pangan dan Gizi (SKPG) dengan melaksanakan 3 Kegiatan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> * Peramalan situasi pangan dan Gizi melalui SIDI termasuk peramalan ketersediaan pangan dan pemantauan pertumbuhan balita dan hasil pengamatan social ekonomi. * Kajian situasi pangan dan gizi secara berkala berdasarkan hasil surve khusus atau dari laporan tahunan. 2 Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan pangan (Food Security and Vulnerability Atlas) disusun pada periode 3-5 tahunan yang menggambarkan kondisi sampai tingkat kecamatan/Desa sebagai acuan dalam penentuan program 3 Perhitungan tingkat kerawanan dengan membandingkan jumlah penduduk miskin yang mengkonsumsi pangan berdasarkan 3 Kriteria Prosentase angka kecukupan gizi (AKG) sebesar 2,000 Kalori yaitu : 	<p>90%</p>

			<ul style="list-style-type: none"> • Penduduk sangat rawan <70%AKG • Penduduk pangan resiko sedang ,70%-89,9%AKG. • Penduduk tahan pangan > 89,9% AKG <p>B Perhitungan Rumus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistim kewaspadaan pangan dan Gizi (SKPG) • Indikator yang digunakan dengan pendekatan SKPD <p>"- Pertanian : Ketersediaan Pangan "- Kesehatan : Preferensi energy "- Sosial Ekonomi : Kemiskinan karena sejahtera dan prasejahtera</p> <p>Dengan Rumus :</p> $\frac{\text{IndikatorPertanian}}{\text{Produksi pangan x harga pangan non padi}} \times 100 \%$ $\frac{\text{IndikatorKesehatan}}{\text{(Rp/Kg) / Harga Beras (Rp/Kg)}} \times 100 \%$ $\frac{\text{(n gizi kurang < -2 SD)}}{\text{(n balita yang dikumpulkan PSG)}} \times 100$ <p>Indikator Sosial Ekonomi :</p> <p>Kriterian yang digunakan untuk mengelompokan keluarga – keluarga kedalam status kemiskinan adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Keluarga Pra sejahtera (PS) : Jika tidak memenuhi salah satu syarat sebagai keluarga sejahtera. * Keluarga sejahtera Satu (KS1) : Jika dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal 		
2	Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan	1	Persentase peningkatan kelembagaan petani	<p>A Penjelasan</p> <p>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani merupakan upaya untuk menumbuhkembangkan kelembagaan petani menjadi kelembagaan ekonomi yang berdayasaing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan.</p> <p>B Perhitungan</p> $\text{PKT} = \frac{\text{BNp}}{\text{JP}} \times 100 \%$ <p>Keterangan :</p> <p>PKT = Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani. BNp = Bobot Nilai Kelas Tahun t JP = Jumlah Kelompok Tani Tahun t</p>	52%

3	Meningkatkan Ketrampilan dan Pengetahuan Petani	2 Persentase peningkatan akses petani terhadap informasi dan teknologi	<p>A Penjelasan</p> <p>Peningkatan Akses Petani terhadap Informasi dan Teknologi merupakan upaya untuk memberikan kemudahan akses petani ke sumber informasi dan teknologi, serta sumberdaya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya.</p> <p>B Perhitungan</p> $Ppt = \frac{pb}{JP} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>PKT = Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani.</p> <p>BNp = Bobot Nilai Kelas Tahun t</p> <p>JP = Jumlah Kelompok Tani Tahun t</p>	20%
---	---	--	---	-----

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015
CAMAT PONTIANAK BARAT
KOTA PONTIANAK**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Penjelasan / FORM Perhitungan	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik yang Prima Kepada Masyarakat	1 Nilai Kepatuhan pelayanan Publik	Memberikan kesempatan kepada aparaturnya pemerintah kecamatan untuk mengembangkan keahlian dan ketrampilannya	81%
2	Meningkatnya koordinasi Pembangunan Kecamatan dengan Masyarakat	1 Persentase hasil Musrembang Kecamatan yang terakomodir dalam Kecamatan yang	Mendorong pembangunan infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat secara merata dan profesional	82%
3	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	1 Persentase keterlibatan RT dalam kegiatan pembangunan di kecamatan	Melakukan pembinaan dan penataan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan serta RT/RW melalui koordinasi antar instansi di lingkungan	82%
4	Meningkatnya kesadaran hukum dan keamanan dan ketertiban masyarakat	1 Persentase menurunnya masalah pelanggaran keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang difasilitasi di Kecamatan	Mendorong kesadaran masyarakat untuk menciptakan kondisi yang kondusif, stabil, aman dan tertib, menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan	91%
5	Meningkatnya Penguatan lembaga sosial dan ekonomi masyarakat dan ekonomi masyarakat	1 Persentase lembaga sosial masyarakat yang berperan aktif dalam layanan sosial dasar di	Memberikan perlindungan terhadap kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan masyarakat dibidang sosial, ekonomi dan budaya dengan memperhatikan	82%

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PONTIANAK**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Penjelasan / FORM Perhitungan	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya kualitas dan keseimbangan kelestarian lingkungan hidup	1 Luas Ruang Terbuka Hijau di lingkungan dan memperoleh penghargaan Adipura	A Penjelasan Merupakan program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dimana target untuk 5 tahun kedepan sebesar 75% sehingga tiap tahunnya sebesar 15%	15%
		2 Jumlah sekolah peserta Adiwiyata	A Penjelasan Merupakan bagian dari kegiatan Pusat Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia yang dituangkan dalam kegiatan peningkatan kapasitas adiwiyata, target peserta pada tahun 2015 berdasarkan jumlah peserta pada awal perencanaan di tahun 2013 sebanyak 40 peserta sekolah	40
		3 Nilai Adipura Kota Pontianak	A Penjelasan Merupakan kegiatan koordinasi penilaian kota sehat/adipura dengan perencanaan awal pada tahun 2013 dengan nilai 65,46, pada tahun 2015 ditargetkan mendapatkan nilai sebesar 66	66
		4 Luas Ruang Terbuka Hijau Tiap RW dan animo masyarakat terhadap kegiatan yang terkait pelestarian lingkungan	A Penjelasan Merupakan program perlindungan dan konservasi sumber daya alam dimana target untuk 5 tahun kedepan sebesar 75% sehingga tiap tahunnya sebesar 15%	15%
		5 Jumlah peserta Clean and Green City	A Penjelasan Merupakan kegiatan Clean and Green City dimana target yang ditetapkan berdasarkan perencanaan awal pada tahun 2013 sebanyak 20 peserta Clean and Green City	20
		6 Jumlah kegiatan yang terkait pelestarian lingkungan pada hari lingkungan hidup	A Penjelasan Merupakan kegiatan peringatan hari lingkungan hidup dimana target yang ditetapkan pada tahun 2015 sebanyak 4 kegiatan berdasarkan perencanaan awal pada tahun 2013 sebanyak 4 kegiatan	4
2	Terwujudnya pengawasan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk pelayanan kepada masyarakat dalam bidang lingkungan hidup	1 Data jumlah kegiatan usaha yang taat dan patuh pada persyaratan teknis dan administratif pengelolaan dampak lingkungan	A Penjelasan Merupakan program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam dimana dimana target untuk 5 tahun kedepan sebesar 75% sehingga tiap tahunnya sebesar 15%	15%
		2 jumlah kegiatan usaha yang di bina	A Penjelasan Merupakan kegiatan pembinaan pengelolaan lingkungan dimana target yang ditetapkan pada awal perencanaan untuk 5 tahun mendatang, kegiatan usaha yang dibina sebanyak 660 kegiatan usaha sehingga diperoleh tiap tahunnya sebanyak 132 kegiatan usaha yang dibina	132 kegiatan usaha

3	Data Kualitas Lingkungan di Kota Pontianak dan animo generasi muda terhadap pelestarian lingkungan hidup	A Penjelasan Merupakan program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup perkotaan dimana target untuk 5 tahun kedepan sebesar 75% sehingga tiap tahunnya sebesar 15%	15%
4	Laporan SLHD Setiap tahun	A Penjelasan Merupakan bagian dari kegiatan Pusat Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia yang dilakukan setiap tahun pada seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang dituangkan dalam Penyusunan laporan SLHD Kota Pontianak sebanyak 1 buah setiap tahunnya	100%
5	jumlah peserta Duta Lingkungan	A Penjelasan Berdasarkan jumlah peserta Duta Lingkungan Hidup tahun 2013 sebanyak 40 peserta	40 Peserta
6	Kepatuhan Kegiatan Usaha terhadap peraturan terkait lingkungan hidup	A Penjelasan Merupakan program peningkatan pengendalian polusi berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup perkotaan dimana target untuk 5 tahun kedepan sebesar 75% sehingga tiap tahunnya sebesar 15%	15%
7	Jumlah Dokumen Lingkungan yang dilakukan penilaian	A Penjelasan Merupakan kegiatan penilaian dokumen lingkungan kegiatan usaha yang ada di Kota Pontianak, dimana pada tahun 2014 terdapat 102 dokumen lingkungan yang masuk untuk dilakukan penilaian dan pada tahun 2015 ditargetkan dokumen lingkungan yang masuk meningkat 20% atau 20 dokumen. Sehingga total sebesar 122 dokumen	20%
8	Jumlah Kegiatan Usaha yang memiliki buangan dibawah baku mutu	A Penjelasan Dari jumlah kegiatan usaha di Kota Pontianak sebanyak 870 kegiatan usaha, ± 69 (sebesar 8%) kegiatan usaha yang memiliki buangan dibawah baku mutu lingkungan	8%
9	Jumlah Kegiatan Usaha yang diawasi	A Penjelasan Data jumlah kegiatan usaha sebanyak 870 kegiatan usaha, sebanyak 141 kegiatan usaha taat persyaratan teknis dan administratif, target kegiatan usaha yang diawasi oleh BLH Kota Pontianak pada tahun 2015 sebanyak 100 kegiatan	100 kegiatan usaha
10	Pengendalian pencemaran dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat	A Penjelasan Merupakan program pengendalian pencemaran dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat dimana ditargetkan selama 5 tahun kedepan ditetapkan setiap tahun dari tahun 2015-2019 adalah 15%,20%,20%30% dan 15%. Tahun 2015 sebesar 15% kasus yang terselesaikan dari tindak lanjut pengaduan dari masyarakat	15%
11	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	A Penjelasan Berdasarkan perencanaan awal pada tahun 2013 jumlah pengaduan masyarakat ditargetkan 50% terselesaikan dari pengaduan yang masuk pada tahun 2015	50%
12	Jumlah Kegiatan Usaha yang di ambil sampel	A Penjelasan Merupakan kegiatan pencegahan pencemaran udara dari sumber emisi. Berdasarkan data capaian awal perencanaan terdapat 9 kegiatan usaha yang diawasi, pada tahun 2013 hanya 5 kegiatan usaha yang taat, sehingga ditargetkan pada tahun 2015 kegiatan yang taat sebanyak 6 kegiatan usaha	6 kegiatan yang taat

3	Tersedianya sarana dan prasarana Aparatur untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kedinasan	13	Jumlah Titik sampel	A Penjelasan Merupakan kegiatan pemantauan kualitas air Kota Pontianak, adapun pemantauan kualitas air dilakukan di 6 kecamatan wilayah Kota Pontianak, Sungai Kapuas dan Landak, serta sumur pantau di TPA Batu Layang, total titik pengambilan sampel di setiap titik pemantauan adalah 180 titik sampel setiap tahunnya	180 titik sampel
		14	Jumlah Pengambilan sampel udara dalam setahun	A Penjelasan Penyusunan laporan kualitas udara ambien setiap tahunnya	1 laporan
		15	Jumlah Pelatihan dan Penambahan Alat Laboratorium	A Penjelasan Jumlah pelatihan dan penambahan alat laboratorium merupakan bagian penilaian akreditasi laboratorium lingkungan dan target yang ditetapkan pada tahun 2015 sebesar 40%	40%
		1	Lancarnya aktifitas administrasi perkantoran		
		2	Suplai listrik untuk aktivitas kantor	A Penjelasan Pembayaran tagihan listrik di Kantor BLH Kota Pontianak setiap bulan dalam setahun	12 bulan
		3	Kebersihan di lingkungan kantor	A Penjelasan Merupakan kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor guna menjaga kebersihan lingkungan maupun gedung kantor selama setahun	12 bulan
		4	Peralatan Tulis Kantor	A Penjelasan Pemenuhan ATK di BLH Kota Pontianak selama setahun	12 bulan
		5	Penyusunan laporan rutin	A Penjelasan Merupakan kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama setahun di BLH Kota Pontianak	12 bulan
		6	Kualitas sistem listrik kantor	A Penjelasan Merupakan kegiatan penyediaan komponen listrik di BLH Kota Pontianak guna kelancaran pelayanan administrasi	12 bulan
		7	Referensi bacaan	A Penjelasan Pemenuhan kebutuhan bacaan selama setahun pada BLH Kota Pontianak	1080 eks
8	Kebutuhan makan minum pegawai	A Penjelasan Pembayaran makan minum pegawai BLH Kota Pontianak selama setahun (hari kerja)	264 hari		
9	Koordinasi terkait kedinasan	A Penjelasan Terwujudnya kegiatan rapat-rapat koordinasi keluar daerah selama setahun berkaitan dengan kegiatan di BLH Kota Pontianak	100%		
10	Jasa teknis terkait perkantoran	A Penjelasan Merupakan kegiatan penyediaan jasa teknis administrasi perkantoran selama 1 tahun guna menunjang kelancaran administrasi di BLH Kota Pontianak	12 bulan		

11	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		
12	Utilitas gedung kantor		
13	Kualitas bangunan gedung kantor	A Penjelasan Merupakan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung kantor selama 1 tahun/12 bulan dengan tujuan untuk menjaga kondisi bangunan gedung kantor guna kelancaran kegiatan peayanan administrasi di BLH Kota Pontianak	12 bulan
14	Kualitas kendaraan dinas	A Penjelasan Merupakan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional selama 1 tahun/12 bulan dengan tujuan untuk	12 bulan
15	Kualitas peralatan gedung kantor	A Penjelasan Merupakan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor selama 1 tahun/12 bulan dengan tujuan untuk menjaga kualitas peralatan gedung kantor guna kelancaran kegiatan di BLH Kota Pontianak	12 bulan
16	Disiplin Aparatur Sipil Negara		
17	Jumlah Pegawai yang diikuti sertakan dalam Kegiatan Pelatihan	A Penjelasan Kegiatan pelatihan terdiri dari bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kedinasan selama 1 tahun	1 Lumsum
18	Kedisiplinan Pegawai terkait Seragam Dinas		
19	Kebutuhan pakaian dinas pegawai	A Penjelasan Pemenuhan kebutuhan pakaian dinas pegawai di BLH sebanyak 34 stel pakaian dinas dengan jumlah pegawai sebanyak 33 orang pegawai	34 stel
20	Jumlah Laporan Pengembangan dan Capaian		
21	Dokumen Rencana Kerja yang direncanakan	A Penjelasan Dokumen rencana kerja yang direncanakan pada setiap SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun selanjutnya	6 Laporan
22	Laporan Hasil Capaian Kinerja (LPPD, LAKIP, SAKIP, SPIP, PKK)	A Penjelasan Laporan hasil capaian kinerja dilaporkan dalam laporan LPPD, LAKIP (Laporan Kinerja), SAKIP, SPIP dan PKK setiap tahunnya.	5 Laporan
23	Sistem Keuangan yang akuntabel		
24	Laporan Keuangan selama setahun	A Penjelasan Laporan keuangan merupakan laporan yang disampaikan oleh SKPD selama setahun	1 Laporan
25	Pelayanan Publik yang lancar dan akuntabel		
26	sistem kinerja yang akuntabel & terukur	A Penjelasan Sistem kinerja yang akuntabel & terukur disusun dalam Laporan IKM selama setahun dengan pelaksanaan setiap semester	1 Laporan
27	Manajemen Mutu Pelayanan mendapat		-
28	Manajemen Mutu Pelayanan dapat		-
29	Informasi seputar perkembangan pelayanan		
30	Jumlah Data dan Profil SKPD yang dikembangkan	A Penjelasan Penyusunan Profil BLH Kota Pontianak setiap tahun	Profil Setiap Tahun
31	Sistem Informasi yang dimiliki BLH Kota		
32	Sistem Informasi yang diterapkan	A Penjelasan Sistem informasi pada SKPD yang diterapkan dengan sistem online dengan anggaran yang telah ditetapkan (1 Lumsum)	1 Lumsum
33	Jumlah Artikel yang dibuat selama setahun	A Penjelasan Penerbitan/penayangan artikel yang dibuat oleh SKPD 1 (satu) buah artikel setiap bulannya pada website SKPD	24 Artikel

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015
CAMAT PONTIANAK KOTA
KOTA PONTIANAK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Penjelasan / FORM Perhitungan	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik yang Prima Kepada Masyarakat	1 Nilai Kepatuhan pelayanan Publik	<p>a Penjelasan Indikator Kinerja berupa Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik ini menggunakan hasil pengukuran/survey oleh lembaga di luar Kecamatan/SKPD yakni Ombudsman.</p> <p>b Perhitungan Nilai Kepatuhan pelayanan publik didapat dari hasil pengukuran oleh lembaga lain diluar Kecamatan/SKPD yakni Ombudsman, yang mana nilai ini merupakan akumulasi dari penilaian terhadap komponen pelayanan publik mulai dari sarana dan prasarana pelayanan hingga pelaksanaan pelayanan (kecepatan dan ketepatan serta kenyamanan pelayanan)</p>	81%
2	Meningkatnya koordinasi Pembangunan Kecamatan dengan Masyarakat	1 Persentase hasil Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam forum SKPD dibidang Fisik dan Prasarana, Ekonomi, Sosial dan Budaya	<p>a Penjelasan Persentase hasil musrenbang tingkat kecamatan yang terakomodir dalam forum SKPD dicapai melalui perbandingan hasil musrenbang tingkat kecamatan bidang fisik dan prasaran, ekonomi serta sosial dan budaya yang diakomodir SKPD dengan hasil usulan musrenbang tingkat kecamatan bidang fisik dan prasaran, Ekonomi serta Sosial dan Budaya yang prioritas</p> <p>b Perhitungan</p> <p>* Fisik dan Prasarana</p> $\frac{\text{Hasil musrenbang tingkat kecamatan bidang fisik dan prasaran yang diakomodir SKPD}}{\text{Hasil usulan musrenbang tingkat kecamatan bidang fisik dan prasaran yang prioritas}} \times 100 \%$ <p>* Ekonomi</p> $\frac{\text{Hasil musrenbang tingkat kecamatan bidang ekonomi yang diakomodir SKPD}}{\text{Hasil usulan musrenbang tingkat kecamatan bidang ekonomi yang prioritas}} \times 100 \%$ <p>* Sosial Budaya</p> $\frac{\text{Hasil musrenbang tingkat kecamatan bidang sosial budaya yang diakomodir SKPD}}{\text{Hasil usulan musrenbang tingkat kecamatan bidang sosial budaya yang prioritas}} \times 100 \%$	82%

3	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	1 Persentase keterlibatan RT dalam kegiatan pembangunan di kecamatan	<p>a Penjelasan</p> <p>Persentase keterlibatan RT dalam kegiatan pembangunan di kecamatan didapat dari hasil membandingkan Jumlah RT yang ikut berpartisipasi` dalam kegiatan pembangunan di Kecamatan dengan Jumlah RT yang terlibat dalam kegiatan pembangunan di Kecamatan</p> <p>Persentase keterlibatan RT dalam kegiatan pembangunan di kecamatan didapat dari hasil membandingkan Jumlah RT yang ikut berpartisipasi` dalam kegiatan pembangunan di Kecamatan dengan Jumlah RT yang terlibat dalam kegiatan pembangunan di Kecamatan</p> <p>b Perhitungan</p> <p>Jumlah RT yang ikut berpartisipasi` dalam kegiatan pembangunan di Kecamatan</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p style="text-align: right;">X 100 %</p> <p style="margin-left: 20px;">Jumlah RT yang terlibat dalam kegiatan pembangunan di Kecamatan</p> <p>* Gotong Royong</p> <p>Jumlah RT yang ikut berpartisipasi` dalam kegiatan gotong royong di Kecamatan</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p style="text-align: right;">X 100 %</p> <p style="margin-left: 20px;">Jumlah RT yang terlibat dalam kegiatan gotong royong di Kecamatan</p> <p>* Perayaan Hari Besar Daerah</p> <p>Jumlah RT yang ikut berpartisipasi` dalam kegiatan Perayaan Hari Besar Daerah di Kecamatan</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p style="text-align: right;">X 100 %</p> <p style="margin-left: 20px;">Jumlah RT yang terlibat dalam kegiatan Perayaan Hari Besar Daerah di Kecamatan</p> <p>* HUT RI</p> <p>Jumlah RT yang ikut berpartisipasi` dalam kegiatan HUT RI di Kecamatan</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p style="text-align: right;">X 100 %</p> <p style="margin-left: 20px;">Jumlah RT yang terlibat dalam kegiatan HUT RI di Kecamatan</p> <p>* Perlombaan Kecamatan dan Kelurahan</p> <p>Jumlah RT yang ikut berpartisipasi` dalam kegiatan HUT RI di Kecamatan</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p style="text-align: right;">X 100 %</p> <p style="margin-left: 20px;">Jumlah RT yang terlibat dalam kegiatan HUT RI di Kecamatan</p> <p>* Inovasi Unggulan Kelurahan</p>	82%
---	---	--	--	-----

			<p>Jumlah RT yang ikut berpartisipasi` dalam kegiatan Inovasi Unggulan Kelurahan di Kecamatan</p> $\frac{\text{Jumlah RT yang terlibat dalam kegiatan Inovasi Unggulan Kelurahan di Kecamatan}}{\text{* Database Kecamatan}} \times 100 \%$ <p>Jumlah RT yang ikut berpartisipasi` dalam kegiatan database Kecamatan di Kecamatan</p> $\frac{\text{Jumlah RT yang terlibat dalam kegiatan Database Kecamatan di Kecamatan}}{\text{* Database Kecamatan}} \times 100 \%$	
4	Meningkatnya kesadaran hukum dan keamanan dan ketertiban masyarakat	1	<p>Persentase menurunnya masalah pelanggaran keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang difasilitasi di Kecamatan</p> <p>a Penjelasan</p> <p>Persentase menurunnya masalah pelanggaran keamanan dan ketertiban masyarakat yang difasilitasi di Kecamatan dicapai melalui membandingkan jumlah realisasi kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan di kecamatan terhadap masalah keamanan dan ketertiban dengan Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan di kecamatan terhadap masalah keamanan dan ketertiban</p> $\frac{\text{Jumlah realisasi kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan di kecamatan terhadap masalah keamanan dan ketertiban}}{\text{Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan di kecamatan terhadap masalah keamanan dan ketertiban}} \times 100 \%$ <p>b Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah realisasi kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan di kecamatan terhadap masalah keamanan dan ketertiban}}{\text{Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan di kecamatan terhadap masalah keamanan dan ketertiban}} \times 100 \%$ $\frac{\text{Jumlah realisasi kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan i kecamatan terhadap masalah PKL}}{\text{Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan di kecamatan terhadap masalah PKL}} \times 100 \%$ <p>* Bangunan Liar</p> $\frac{\text{Jumlah realisasi kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan di kecamatan terhadap masalah Bangunan Liar}}{\text{Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan di kecamatan terhadap masalah Bangunan Liar}} \times 100 \%$	91%

5	Meningkatnya Penguatan lembaga sosial dan ekonomi masyarakat dan ekonomi masyarakat	1 Persentase lembaga sosial masyarakat yang berperan aktif dalam layanan sosial dasar di masyarakat	<p>a Penjelasan Yang dimaksudkan dengan persentase lembaga sosial masyarakat yang berperan aktif dalam layanan dasar masyarakat yakni lembaga lembaga sosial yang aktif dan responsif dalam mengedukasi masyarakat sehingga kemampuan masyarakat meningkat dicapai dengan membandingkan Jumlah realisasi kegiatan lembaga sosial yang dibina Kecamatan dengan Jumlah lembaga sosial yang aktif dan dibina Kecamatan</p> <p>b Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah realisasi kegiatan lembaga sosial yang dibina Kecamatan}}{\text{Jumlah lembaga sosial yang aktif dan dibina Kecamatan}} \times 100 \%$ <p>* PKK</p> $\frac{\text{Jumlah realisasi kegiatan PKK}}{\text{Jumlah PKK yang aktif dan dibina Kecamatan}} \times 100 \%$ <p>* Posyandu</p> $\frac{\text{Jumlah realisasi kegiatan Posyandu}}{\text{Jumlah Posyandu yang aktif dan dibina Kecamatan}} \times 100 \%$ <p>* LPTQ</p> $\frac{\text{Jumlah realisasi kegiatan LPTQ}}{\text{Jumlah LPTQ yang aktif dan dibina Kecamatan}} \times 100 \%$	82%
---	---	---	---	-----

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PONTIANAK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Penjelasan / FORM Perhitungan	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kinerja Aparatur Untuk Mewujudkan Pelayanan Prima dan Tata Pemerintahan Yang Baik.	1. Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.	1. Sejahterama tingkat pemenuhan fasilitas pendukung kelancaran kegiatan dan administrasi perkantoran. <i>Perhitungan : Rata-rata Kumulatif hasil capaian</i> <i>Indikator Kinerja Kegiatan (Output).</i>	100%
		2. Persentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur.	2. Sejahterama tingkat pemenuhan fasilitas (sarana dan Prasarana kerja) dalam peningkatan pelayanan. <i>Perhitungan : Rata-rata Kumulatif hasil capaian</i> <i>Indikator Kinerja Kegiatan (Output).</i>	95%
		3. Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur.	3. Tingkat pemenuhan kebutuhan peningkatan disiplin Aparatur melalui pendidikan peningkatan SDM dan kebutuhan pakaian seragam. <i>Perhitungan : Rata-rata Kumulatif hasil capaian</i> <i>Indikator Kinerja Kegiatan (Output).</i>	100%
		4. Persentase Tertib Administrasi Penyusunan Program Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan.	4. Pemenuhan kebutuhan operasional pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan. <i>Perhitungan : Rata-rata Kumulatif hasil capaian</i> <i>Indikator Kinerja Kegiatan (Output).</i>	100%
2.	Meningkatnya Pelayanan dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan.	1. Persentase Tingkat Keberfungsian APILL dan Fasilitas Perlengkapan Jalan.	1. Tingkat pemenuhan operasional pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan lalu lintas. <i>Perhitungan : Rata-rata Kumulatif hasil capaian</i> <i>Indikator Kinerja Kegiatan (Output).</i>	100%
		2. Persentase Terpeliharanya Terminal dan Halte dengan Baik.	2. Tingkat pemenuhan operasional pemeliharaan fasilitas Terminal dan Halte. <i>Perhitungan : Rata-rata Kumulatif hasil capaian</i> <i>Indikator Kinerja Kegiatan (Output).</i>	80%
		3. Persentase Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu-Rambu, Marka dan Guardrail).	3. Tingkat Pemenuhan Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan. <i>Perhitungan : Rata-rata Kumulatif hasil capaian</i> <i>Indikator Kinerja Kegiatan (Output).</i>	40%

		4. Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Darat.	4. Tingkat Pemenuhan Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan. <i>Perhitungan</i> : Rata-rata Kumulatif hasil capaian Indikator Kinerja Kegiatan (Output).	90%
		5. Persentase Peningkatan Penertiban Parkir Pada Kawasan Perdagangan dan Jasa.	5. Tingkat Pemenuhan Pelayanan Perparkiran serta Pengawasan, Pembinaan dan Penertiban Perparkiran. <i>Perhitungan</i> : Rata-rata Kumulatif hasil capaian Indikator Kinerja Kegiatan (Output).	100%
		6. Persentase Kelancaran Arus Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	6. Tingkat Pelaksanaan Operasional Pelayanan, Pengawasan dan Pembinaan Lalu Lintas Angkutan Jalan. <i>Perhitungan</i> : Rata-rata Kumulatif hasil capaian Indikator Kinerja Kegiatan (Output).	90%
		7. Persentase Peningkatan Potensi Parkir.	7. Sejauhmana Upaya Peningkatan Pengembangan Potensi Parkir. <i>Perhitungan</i> : Rata-rata Kumulatif hasil capaian Indikator Kinerja Kegiatan (Output).	90%
		8. Persentase Berfungsinya Dermaga Sungai dan Pelabuhan Penyeberangan.	8. Sejauhmana Upaya Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan/Rehab Dermaga Pedalaman dan Sampan Bermotor serta Pelabuhan Penyeberangan. <i>Perhitungan</i> : Rata-rata Kumulatif hasil capaian Indikator Kinerja Kegiatan (Output).	100%
		9. Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai.	9. Tingkat Pemenuhan Fasilitas Dermaga Pedalaman dan Sampan Bermotor serta Pelabuhan Penyeberangan. <i>Perhitungan</i> : Rata-rata Kumulatif hasil capaian Indikator Kinerja Kegiatan (Output).	97.50%
		10. Persentase Jumlah Uji Kendaraan Angkutan Umum dan Barang.	10. Sejauhmana Upaya Peningkatan Pengujian Kendaraan Bermotor. <i>Perhitungan</i> : Rata-rata Kumulatif hasil capaian Indikator Kinerja Kegiatan (Output).	65%
3.	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan Akses Informasi, Komunikasi dan Informatika.	1. Persentase Jumlah Ijin Usaha Jasa Telekomunikasi Yang Memenuhi Syarat dan Ketentuan.	1. Sejauhmana Upaya Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Jasa Usaha dan Menara Telekomunikasi. <i>Perhitungan</i> : Rata-rata Kumulatif hasil capaian Indikator Kinerja Kegiatan (Output).	85%
		2. Persentase Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informatika.	2. Upaya Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan serta Pengelolaan Website dan Jaringan. <i>Perhitungan</i> : Rata-rata Kumulatif hasil capaian Indikator Kinerja Kegiatan (Output).	78%

	<p>3. Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Media Massa. - Media Website (Media Online). - Media Tradisional. - Media Interpersonal. - Media Luar Ruang (Buletin, Leaflet, Booklet, Brosur, Baliho dan Spanduk) 	<p>3. Tingkat Upaya Penyampaian dan Pendistribusian Informasi Kepada Masyarakat.</p> <p><u>Perhitungan</u> : Rata-rata Kumulatif hasil capaian Indikator Kinerja Kegiatan (Output).</p>	<p>100%</p> <p>4 kali/th setiap hari 2 kali/th 3 kali/th 6 kali/th</p>
	<p>4. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) ditingkat Kecamatan.</p>	<p>4. Upaya Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat Kecamatan.</p> <p><u>Perhitungan</u> : Jumlah KIM yang Ada dibagi Jumlah Kecamatan, dikali 100%.</p>	<p>30%</p>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PONTIANAK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Penjelasan / From Perhitungan	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bencana dan bahaya kebakaran	1.1 Persentase peningkatan tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	<p>A Penjelasan</p> <p>Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dimulai saat menerima informasi sampai tiba di tempat kejadian kebakaran, yang langsung melakukan tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda, dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.</p> <p>* Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK</p> $\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100 \%$ <p>* Persentase peningkatan tingkat waktu tanggap</p> $\frac{\text{Tingkat waktu tanggap tahun yang dilaporkan} - \text{Tingkat waktu tanggap tahun sebelumnya}}{\text{Tingkat waktu tanggap tahun sebelumnya}} \times 100 \%$	80%
		2 Persentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi	<p>A Penjelasan</p> <p>Kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi adalah semua kejadian bencana di wilayah kota Pontianak, baik kebakaran gedung, perumahan, lahan, puting beliung, banjir dan lain-lain yang mendapatkan penanganan dari BPBD Kota Pontianak</p> $\frac{\text{Jumlah korban yang mendapatkan bantuan kebutuhan dasar}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100 \%$	80%
2	Meningkatnya pelayanan, penanganan dan penanggulangan bencana yang berkualitas dan profesional	1 Persentase terdatanya peristiwa bencana dan terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana	<p>A Penjelasan</p> <p>Adalah jumlah korban bencana yang mendapatkan bantuan berupa kebutuhan dasar pasca terjadinya bencana, yaitu berupa makanan instan, selimut, pakaian bayi, dan lain-lain.</p> $\frac{\text{Jumlah korban yang mendapatkan bantuan kebutuhan dasar}}{\text{Jumlah korban yang tertimpa bencana}} \times 100 \%$	60%

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015
CAMAT PONTIANAK TENGGARA
KOTA PONTIANAK**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Penjelasan / Form Perhitungan	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik yang Prima Kepada Masyarakat	1 Persentase capaian IKM terhadap pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan	<p>a Penjelasan Indikator berupa capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini didapat dari survey yang dilakukan terhadap Masyarakat penerima layanan di Kecamatan dan Kelurahan dengan menggunakan Kuesioner sebagaimana keputusan MENPAN Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah</p> <p>b Perhitungan Nilai capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didapat dari survey yang dilakukan terhadap Masyarakat penerima layanan di Kecamatan dan Kelurahan dengan menggunakan Kuesioner sebagaimana keputusan MENPAN Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, yang mana ini merupakan akumulasi dari penilaian terhadap 14 unsur/komponen pelayanan publik.</p>	85%
2	Meningkatnya kesadaran hukum dan keamanan dan ketertiban masyarakat	1 Persentase berkurangnya pelanggaran hukum dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	<p>a Penjelasan Persentase menurunnya masalah pelanggaran hukum dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dicapai melalui membandingkan jumlah pembinaan, penertiban, fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan di kecamatan terhadap masalah pelanggaran hukum, keamanan dan ketertiban (ketertiban umum) dengan jumlah pelanggaran hukum, keamanan dan ketertiban (ketertiban umum)</p> <p>b Perhitungan</p> <p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah Pelanggaran ketertiban umum yang dilakukan pembinaan dan ketertiban serta sosialisasi peraturan ketertiban umum dan perizinan di Kecamatan}}{\text{Jumlah Pelanggaran ketertiban umum, perizinan dan keamanan di Kecamatan pada tahun berjalan}} \times 100\%$ </p> <p>1. PKL</p> <p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah PKL pelanggar ketertiban umum yang dilakukan pembinaan dan penertiban serta sosialisasi peraturan ketertiban umum dan perizinan di Kecamatan terhadap PKL}}{\text{Jumlah PKL pelanggar ketertiban umum, perizinan dan keamanan di Kecamatan pada tahun berjalan}} \times 100\%$ </p> <p>2. Rumah Kost</p> <p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah Rumah Kost pelanggar ketertiban umum yang dilakukan pembinaan dan penertiban serta sosialisasi peraturan ketertiban umum dan perizinan di Kecamatan}}{\text{Jumlah Rumah Kost pelanggar ketertiban umum, perizinan dan keamanan di Kecamatan pada tahun berjalan}} \times 100\%$ </p> <p>3. Warnet</p>	80%

			<p>Jumlah Warnet pelanggar ketertiban umum yang dilakukan pembinaan dan penertiban serta sosialisasi peraturan ketertiban umum dan perizinan di Kecamatan</p> <hr/> <p style="text-align: right;">X 100 %</p> <p>Jumlah Warnet pelanggar ketertiban umum, perizinan dan keamanan di Kecamatan pada tahun berjalan</p> <hr/> <p>4. Baleho Liar</p> <p>Jumlah Baleho Liar pelanggar ketertiban umum yang dilakukan pembinaan dan penertiban serta sosialisasi peraturan ketertiban umum dan perizinan di Kecamatan terhadap Baleho Liar</p> <hr/> <p style="text-align: right;">x 100 %</p> <p>Jumlah Baleho Liar pelanggar ketertiban umum, perizinan dan keamanan di Kecamatan pada tahun berjalan</p>	
3	2 Meningkatnya koordinasi Pembangunan Kecamatan dengan Masyarakat	1 Persentase Permasalahan Pembangunan Kecamatan/Kelurahan melalui Musrenbang	<p>a Penjelasan</p> <p>Persentase hasil musrenbang tingkat kecamatan yang terakomodir dalam forum SKPD dicapai melalui perbandingan hasil musrenbang tingkat kecamatan bidang fisik dan prasarana, ekonomi serta sosial dan budaya yang diakomodir SKPD dengan hasil usulan musrenbang tingkat kecamatan bidang fisik dan prasarana, Ekonomi serta Sosial dan Budaya yang prioritas</p> <p>b Perhitungan</p> <p style="text-align: center;"> Hasil musrenbang tingkat kecamatan bidang Fisik, Ekonomi dan Sosial Budaya yang diakomodir SKPD </p> <hr/> <p style="text-align: right;">X 100 %</p> <p>Hasil usulan musrenbang tingkat kecamatan bidang fisik ,Ekonomi dan Sosial Budaya yang prioritas</p>	82%
4	Meningkatnya Penguatan lembaga sosial dan ekonomi masyarakat dan ekonomi masyarakat	1 Persentase lembaga sosial masyarakat yang berperan aktif dalam layanan sosial dasar di masyarakat	<p>a Penjelasan</p> <p>Yang dimaksudkan dengan persentase lembaga sosial masyarakat yang berfungsi efektif yakni lembaga sosial dan ekonomi yang mampu mengedukasi dan membina masyarakat sehingga kemampuan dan pengetahuan serta layanan dasar masyarakat dapat meningkat. Dicapai dengan membandingkan jumlah lembaga sosial yang aktif dan dibina Kecamatan dengan jumlah lembaga sosial yang ada Kecamatan tahun berjalan.</p> <p>b Perhitungan</p> <p style="text-align: center;"> Jumlah lembaga sosial yang aktif dan dibina Kecamatan </p> <hr/> <p style="text-align: right;">X 100 %</p> <p style="text-align: center;"> Jumlah lembaga sosial yang dibina Kecamatan tahun berjalan </p> <p>1. PKK</p> <p style="text-align: center;"> Jumlah PKK yang aktif dan dibina Kecamatan </p> <hr/> <p style="text-align: right;">X 100 %</p> <p style="text-align: center;"> Jumlah PKK yang dibina Kecamatan tahun berjalan </p> <p>* Posyandu</p> <p style="text-align: center;"> Jumlah Posyandu yang aktif dan dibina Kecamatan </p> <hr/> <p style="text-align: right;">X 100 %</p> <p style="text-align: center;"> Jumlah Posyandu yang dibina Kecamatan tahun berjalan </p>	82%

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015
DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Penjelasan / From Perhitungan	TARGET
1	2	3	6	5
1	Meningkatnya pemerataan mutu pendidikan pada jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA	1 Angka partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Penjelasan Persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang SD/MI (berapa pun usianya) terhadap jumlah penduduk usia 7 s/d 12 tahun Perhitungan $\frac{\text{Jumlah siswa SD/MI}}{\text{Jumlah penduduk umur 7-12 tahun}} \times 100\%$	114.50%
		2 Angka partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	Penjelasan Persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang SMP/MTs (berapa pun usianya) terhadap jumlah penduduk usia 13 s/d 15 tahun Perhitungan $\frac{\text{Jumlah siswa SMP/MTs}}{\text{Jumlah penduduk umur 13-15 tahun}} \times 100\%$	111.50%
		3 Angka partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA	Penjelasan Persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang SMA/SMK/MA (berapa pun usianya) terhadap jumlah penduduk usia 16 s/d 18 tahun Perhitungan $\frac{\text{Jumlah siswa SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah penduduk umur 16-18 tahun}}$	101.50%
		4 Angka partisipasi Murni (APM) SD/MI	Penjelasan Persentase jumlah penduduk pada kelompok usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang SD/MI, terhadap jumlah seluruh penduduk usia 7-12 tahun Perhitungan $\frac{\text{Jumlah siswa SD/MI umur 7-12}}{\text{Jumlah penduduk umur 7-12 tahun}} \times 100\%$	106.50%

		5 Angka partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	Penjelasan Persentase jumlah penduduk pada kelompok usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang SMP/MTs. terhadap iumlah seluruh penduduk usia 13-15 tahun Perhitungan $\frac{\text{Jumlah siswa SMP/MTs umur 13-15}}{\text{Jumlah penduduk umur 13-15 tahun}} \times 100\%$	103.50%
		6 Angka partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA	Penjelasan Persentase jumlah penduduk pada kelompok usia 16-18 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang SMA/SMK/MA terhadap jumlah seluruh penduduk usia 16-18 tahun Perhitungan $\frac{\text{Jumlah siswa SMA/SMK/MA umur 16-18}}{\text{Jumlah penduduk umur 16-18 tahun}} \times 100\%$	94.51%
		7 Rasio Guru SD/MI terhadap murid	Perbandingan Jumlah Guru SD/MI terhadap Jumlah Murid	1:20
		8 Rasio Guru SMP/MTs terhadap murid	Perbandingan Jumlah Guru SMP/MTs terhadap Jumlah Murid	1:20
		9 Rasio Guru SMA terhadap murid	Perbandingan Jumlah Guru SMA terhadap Jumlah Murid	1:18
		10 Rasio Guru SMK terhadap murid	Perbandingan Jumlah Guru SMK terhadap Jumlah Murid	1:18
		11 Rasio Guru MA terhadap murid	Perbandingan Jumlah Guru MA terhadap Jumlah Murid	1:15
		12 Persentase sekolah yang telah diakreditasi	Persentase sekolah yang telah diakreditasi terhadap jumlah sekolah yang terdaftar	90%
2	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan	1 Rasio murid terhadap sekolah SD/MI	Perbandingan Jumlah Siswa terhadap sekolah SD/MI	390
		2 Rasio murid terhadap sekolah	Perbandingan Jumlah Siswa terhadap sekolah SMP/MTs	334
		3 Rasio murid terhadap sekolah	Perbandingan Jumlah Siswa terhadap sekolah SMA/SMK/MA	350
		4 Rasio murid terhadap ruang kelas	Perbandingan Jumlah Siswa terhadap Ruang Kelas SD/MI	32
		5 Rasio murid terhadap ruang kelas	Perbandingan Jumlah Siswa terhadap Ruang Kelas SMP/MTs	34
		6 Rasio murid terhadap ruang kelas	Perbandingan Jumlah Siswa terhadap Ruang Kelas SMA/SMK/MA	32
		7 Rasio Rombongan Belajar terhadap	Perbandingan Jumlah Kelas(Rombel) terhadap Ruang Kelas SD/MI	1.21
		8 Rasio Rombongan Belajar terhadap	Perbandingan Jumlah Kelas(Rombel) terhadap Ruang Kelas SMP/MTs	1.34
		9 Rasio Rombongan Belajar terhadap ruang kelas SMA/SMK/MA	Perbandingan Jumlah Kelas(Rombel) terhadap Ruang Kelas SMA/SMK/MA	1.04

		10 Persentase satuan pendidikan yang	Persentase Jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan terhadap sekolah secara keseluruhan	85%
		11 Persentase satuan pendidikan yang		60%
		12 Persentase satuan pendidikan yang		70%
		13 Persentase satuan pendidikan yang	Persentase Jumlah sekolah yang memiliki laboratorium terhadap sekolah secara keseluruhan	50%
		14 Persentase satuan pendidikan yang		116%
3	Meningkatnya mutu layanan pada semua jenis dan jenjang pendidikan	1 Angka Putus Sekolah SD/MI	Jumlah putus sekolah jenjang SD/MI	0.01
		2 Angka Putus Sekolah SMP/MTs	Jumlah putus sekolah jenjang SMP/MTs	0.08
		3 Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	Jumlah putus sekolah jenjang SMA/SMK/MA	0.12
		4 Angka Melanjutkan dari jenjang	Jumlah lulusan SD/MI yang melanjutkan ke jenjang SMP/MTs	105
		5 Angka Melanjutkan dari jenjang	Jumlah lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke jenjang SMA/SMK/MA	120
		6 Angka Kelulusan SD/MI	Jumlah Kelulusan tahun sebelumnya jenjang SD/MI	100%
		7 Angka Kelulusan SMP/MTs	Jumlah Kelulusan tahun sebelumnya jenjang SMP/MTs	99.80%
		8 Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	Jumlah Kelulusan tahun sebelumnya jenjang SMA/SMK/MA	99.90%
		9 Nilai rata-rata Ujian SD/MI	Total Nilai Ujian Sekolah siswa SD/MI terhadap Total Siswa yang lulus pada TA tersebut	7.24
		10 Nilai rata-rata Ujian SMP/MTs	Total Nilai Akhir siswa SMP/MTs terhadap Total Siswa yang lulus pada TA tersebut	7.42
		11 Nilai rata-rata Ujian SMA/SMK/MA	Total Nilai Akhir siswa SMA/SMK/MA terhadap Total Siswa yang lulus pada TA tersebut	7.23
4	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang SD/MI, SMP/MTs dan	1 Rasio pengawas sekolah terhadap		01:07.4
		2 Rasio pengawas sekolah terhadap		01:14.8
		3 Rasio pengawas sekolah terhadap		01:07.5
		4 Persentase guru yang aktif pada		100%
5	Meningkatnya mutu tenaga pendidik	1 Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	<p>Penjelasan</p> <p>Persentase jumlah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik (PNS dan non PNS) yang masih mengajar dibagi dengan jumlah guru (PNS dan non PNS) yang masih mengajar secara keseluruhan</p> $\frac{\text{Jumlah guru PNS dan non PNS yang memiliki sertifikat pendidik yang masih mengajar}}{\text{Jumlah guru PNS dan non PNS yang masih mengajar}} \times 100\%$	61.05%

		2	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	<p>Penjelasan</p> <p>Persentase jumlah guru (PNS dan non PNS) yang telah memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan masih mengajar dibagi dengan jumlah guru (PNS dan non PNS) yang masih mengajar secara keseluruhan</p> <p>Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah guru PNS dan non PNS yang memenuhi kualifikasi S1 /D-IV dan masih mengajar}}{\text{Jumlah guru PNS dan non PNS yang masih mengajar}} \times 100\%$	71.21%
6	Tersedianya pusat pendidikan yang murah dan representatif untuk anak didik dan anak putus sekolah	1	Rasio tutor terhadap peserta kejar paket A,B dan C	<p>Penjelasan</p> <p>Rasio jumlah tutor kesetaraan terhadap jumlah warga belajar paket A,B dan C pada kelompok belajar</p> <p>Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Tutor Kesetaraan}}{\text{Jumlah warga belajar kesetaraan paket A,B dan C}}$	1:17
7	Meningkatnya mutu pendidikan PAUDNI	1	Angka partisipasi Kasar (APK) TK/RA	<p>Penjelasan</p> <p>Persentase jumlah siswa yang sedang bersekolah pada jenjang TK/RA (berapa pun usianya) terhadap jumlah penduduk usia 4 s/d 6 tahun</p> <p>Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah siswa TK/RA}}{\text{Jumlah penduduk umur 4-6 tahun}} \times 100\%$	37.90%
		2	Angka partisipasi Kasar (APK) KB/TPA/SPS	<p>Penjelasan</p> <p>Persentase jumlah anak-anak yang sedang mengikuti kegiatan pada jenjang KB/TPA/SPS (berapa pun usianya) terhadap jumlah penduduk usia 0 s/d 4 tahun</p> <p>Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah anak-anak yang mengikuti kegiatan di KB/TPA/SPS}}{\text{Jumlah anak umur 0-4 tahun}} \times 100\%$	18.00%
8	Tersedianya sarana dan prasarana untuk masyarakat berkebutuhan khusus	1	Persentase sarana dan prasarana pendidikan untuk masyarakat berkebutuhan khusus dengan kondisi baik	Persentase jumlah sekolah yang memiliki sarana dan prasarana penunjang siswa berkebutuhan khusus terhadap seluruh sekolah negeri dan swasta jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA	10%
9	Meningkatnya motivasi masyarakat dalam meraih jenjang pendidikan yang lebih tinggi	1	Angka Melek Huruf	Jumlah penduduk penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas secara keseluruhan	99.86%
		2	Rata-rata lama sekolah	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi: a. Partisipasi sekolah b. Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki c. Ijazah tertinggi yang dimiliki d. Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki	10,2 Tahun

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
KOTA PONTIANAK**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Penjelasan / From Perhitungan	TARGET
1	2	3	4	5
1	Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	1	Persentase PMKS skala kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi sejenis lainnya Penjelasan Pelaksanaan kegiatan ini memberikan bantuan usaha untuk keluarga yang tidak mampu sebanyak 38 orang $\frac{\text{£ PMKS yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui UEP}}{\text{£ PMKS yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan melalui UEP}} \times 100 \%$	2%
		2	Persentase PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial $\frac{\text{£ PMKS memperoleh bantuan sosial}}{\text{£ PMKS yang skala kota yang seharusnya memperoleh bantuan sosial}} \times 100 \%$	10%
		3	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Memberikan bantuan untuk penyandang disabilitas berupa kursi roda/alat bantu dengar $\frac{\text{£ Penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang telah menerima bantuan}}{\text{£ Penyandang cacat fisik dan mental yang seharusnya menerima jaminan sosial skala kota}} \times 100 \%$	7%
		4	Persentase panti sosial skala kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Memberikan bantuan penyediaan sarana/prasarana kepada panti asuhan sebanyak 32 panti $\frac{\text{£ Panti sosial yang menyediakan sarana prasarana kesejahteraan sosial}}{\text{£ Panti sosial yang seharusnya menerima bantuan sosial skala besar}} \times 100 \%$	7%
		5	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Rehabilitasi berbasis masyarakat	5%
		6	Persentase korban bencana skala kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat Memberikan bantuan sosial bagi korban bencana $\frac{\text{£ Wahaba (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial}}{\text{£ bagi penggunaan napza yang seharusnya menerima pelayanan skala kota}} \times 100 \%$	100%

		7	Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang dievaluasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Melakukan evaluasi korban bencana $\frac{\text{£ Korban bencana yang dievaluasi menggunakan sarana dan prasarana}}{\text{£ Korban bencana yang seharusnya di evaluasi}} \times 100 \%$ $\frac{\text{£ Korban bencana yang menerima bantuan sosial}}{\text{£ Korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama tanggap darurat}} \times 100 \%$	100%		
2	2	Terciptanya kesempatan kerja diberbagai sektor		1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan yang berbasis Kompetensi berupa pelatihan teknik otomotif/sepeda motor	Meningkatkan keterampilan berbasis kopetensi berupa pelatihan tehnik otomotip/sepeda motor $\frac{\text{£ Tenaga Kerja yang dilatih}}{\text{£ Pendaftaran pelatihan berbasis kopetensi}} \times 100 \%$	5%
		2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan yang berbasis masyarakat	Meningkatnya keterampilan berbasis masyarakat berbasis masyarakat berupa keterampilan batako $\frac{\text{£ Tenaga Kerja yang dilatih}}{\text{£ Pendaftaran pelatihan berbasis masyarakat}} \times 100 \%$	5%		
		3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan		6%		
		4	Besaran pencari kerja yang terdaftar ditempatkan	Kegiatan pelayanan kartu pencari kerja bagi angkatan kerja $\frac{\text{£ Pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{£ Pencari kerja yang terdaftar}} \times 100 \%$	6%		
		5	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Kegiatan ini berupa memberikan pelayanan perselisihan hubungan industrial $\frac{\text{£ Kasus yang diselesaikan dengan PB}}{\text{£ Kasus yang dicatat}} \times 100 \%$	100%		
		6	Besaran pemeriksaan perusahaan	Pelayanan pengawasan ketenaga kerjaan $\frac{\text{£ Perusahaan yang telah diperiksa}}{\text{£ Perusahaan yang terdaftar}} \times 100 \%$	6%		
		7	Besaran pengujian peralatan di perusahaan	Pelayanan pengawasan di perusahaan $\frac{\text{£ Peralatan yang telah di uji}}{\text{£ Peralatan yang terdaftar}} \times 100 \%$	7%		
		8	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS	Pelayanan Kepesertaan jamsostek $\frac{\text{£ Pekerja/buruh peserta program jamsostek}}{\text{£ Peserta yang terdaftar}} \times 100 \%$	1%		

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2015
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PONTIANAK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Penjelasan / From Perhitungan	TARGET	
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan administrasi pemerintahan, konsistensi kualitas produk dan informasi hukum, kapasitas kinerja organisasi perangkat daerah dan akses informasi	1	Penyampaian Laporan Kinerja Tepat Waktu	Sesuai aturan tentang penyerahan LPPD dan Lakip paling lambat tanggal 31 Maret tahun berjalan	2 Dokumen Tepat Sasaran
		2	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan	dari hasil Penilaian LPPD	Sangat Tinggi (ST)
		3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Pontianak	Dari hasil Penilaian Laporan Kinerja (LAKIP)	B
		4	Persentase SKPD yang menyampaikan nilai AKIP berkategori baik	$\frac{\text{Jumlah SKPD}}{\text{Jumlah AKIP SKPD dengan kategori baik}} \times 100\%$	100%
		5	Persentase Unit Pelayanan Publik yang Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) berkategori Baik	$\frac{\text{Jumlah Unit Pelayanan Publik}}{\text{Jumlah Pelayanan Publik yang SKM nya dalam kategori baik}} \times 100\%$	100%
		6	Efektifitas Produk Hukum Daerah	$\frac{\text{Monitoring Eektifitas Produk Hukum}}{\text{Produk Hukum yang dikeluarkan}} \times 100\%$	90%
		7	Persentase Kasus Hukum yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Kasus yang ditangani}}{\text{Jumlah kasus yang dikeluarkan}} \times 100\%$	100%
		8	Persentase Informasi Publik yang di Publikasikan	$\frac{\text{Jumlah informasi Publik yang dipublikasikan}}{\text{Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan}} \times 100\%$	60%
2 2	Meningkatkan kualitas administrasi kebijakan, evaluasi dan monitoring pengendalian Pembangunan dan BUMD	1	Jumlah BUMD yang masuk Katogori Sehat	dari hasil audit BPKP terdapat BUMD	3 BUMD
		2	Jumlah BUMD yang berkontribusi terhadap PAD	Jumlah BUMD yang berkontribusi terdapat PAD	3 BUMD

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2015
DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Penjelasan / Form Perhitungan	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Transparansi dalam Pelayanan Administrasi	1 Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%
		2 Persentase Terlaksananya Peningkatan Sarana		100%
2	Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1 Persentase Tersedianya Laporan Penerapan Sistem Pengendalian Internal dan Laporan		100%
		2 Persentase Tersedianya Laporan Keuangan		100%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	1 Terbangunnya sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi		100%
		2 Persentase penerapan sistem penilaian kinerja		100%
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Persentase Pelayanan Publik dengan Indeks Kepuasan Masyarakat Kategori Baik		100%
5	Penataan Sistem Informasi Kesehatan	1 Persentase Tersedianya Pengembangan Data dan Tersedianya		100%
		2 Persentase		100%
6	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran	$\frac{\text{Angka Kematian Ibu (AKI)/100.000 Kelahiran Hidup}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama}} \times 100,000$ <p>Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun</p>	60,9 per-100.000 KH
		2 Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	$\frac{\text{Angka Kematian Bayi (AKB)/1.000 Kelahiran Hidup}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama}} \times 1000$ <p>Jumlah Bayi (berumur .1 th) yang meninggal di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun</p>	18 per 1000 KH
		3 Angka Kematian Balita (AKB) per 1000 Kelahiran	Angka Kematian Balita (AKB) per	20,1 per 1000 KH
		4 Persentase Kecamatan	Persentase	100%
		5 Angka Kesakitan Diare per 1000 Penduduk	Angka Kesakitan Diare per 1000	214 per 1000 pddk
		6 Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 Penduduk		52 per 1000 pddk
		7 Angka Kesakitan Malaria dari per 1000 Penduduk		<1 per 1000 penduduk
		8 Angka Kesembuhan	Angka Kesembuhan	80%

		9	Persentase Kasus HIV	Persentase Kasus		3%
		10	Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 Penduduk < 15 tahun	Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000		5 per 100.000 pddk <15 Tahun
7	Meningkatnya Kesehatan	1	Persentase Masyarakat	Persentase		76%
		2	Persentase Masyarakat	Persentase		100%
		3	Persentase Tempat -	Persentase Tempat -		87%
		4	Tempat Pengelolaan	Tempat		77%
8	8	Meningkatnya Peran Serta dan Kemandirian Masyarakat	1	Persentase Kelurahan Siaga Aktif	$\% \text{ Kelurahan Siaga Aktif} = \frac{\text{Jumlah Keseluruhan Siaga yang aktif}}{\text{Jumlah kelurahan yang dibentuk}} \times 100 \%$	100%
9	Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Kesehatan	1	Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pra Bayar	$\text{Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pra Bayar} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang terlindungi kesehatannya dengan sistem jaminan kesehatan}}{\text{Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama}} \times 100 \%$	85%	
10 #	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau	1	Persentase Puskesmas Berakreditasi	$\text{Persentase Puskesmas Berakreditasi} = \frac{\text{Jumlah Puskesmas yang terakreditasi}}{\text{Jumlah seluruh Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak}} \times 100 \%$	20%	
		2	Persentase Pelayanan Kesehatan Swasta yang memenuhi syarat	$\% \text{ Pelayanan kesehatan swasta yang memenuhi syarat} = \frac{\text{Jumlah Pelayanan Kesehatan Swasta yang memenuhi syarat}}{\text{Jumlah pelayanan kesehatan swasta}} \times 100 \%$	80%	

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2015
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KOTA PONTIANAK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Penjelasan / Form Perhitungan	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Penguasaan Teknologi dan Kendali Mutu Industri Kecil dan Menengah	1 Predikat Penguasaan Teknologi dan Kendali Mutu Industri	<p>a. Penjelasan: Gugus Kendali Mutu adalah suatu sistem dalam manajemen usaha yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan mutu produksi, dalam rangka meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Penyelenggaraan Konvensi Gugus Kendali Mutu di laksanakan 2 tahun sekali. data predikat diperoleh dari hasil Konvensi Gugus kendali Mutu tingkat provinsi yang diikuti.</p> <p>b. cara perhitungan rumus GKM yang dipersiapkan diseleksi dalam konvensi tingkat kota, hasilnya diikutsertakan konvensi tingkat provinsi, dari konvensi tingkat provinsi diikutsertakan dalam konvensi GKM tingkat Nasional</p> <p>c. contoh GKM siap : GKM XXX, GKM YYY, dan GKM ZZZ Hasil Konvensi GKM Tingkat Kota : Juara 1 : GKM XXX, Juara II : GKM YYY, dst Hasil Konvensi GKM Tingkat Provinsi : Juara 1 : GKM ZZZ jadi Hasil Konvensi GKM Tingkat Provinsi yang merupakan nilai kinerja Bidang Industri dalam pembinaan penguasaan teknologi dan kendali mutu industri.</p>	Peringkat 1 Kalbar
2	Menciptakan iklim Usaha Perdagangan yang Kondusif dan Berdaya Saing	1 Prosentase Peningkatan Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa dalam PDRB	<p>a. Penjelasan Data PRDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kota Pontianak diperoleh dari Statistik Sektor yang dominan dalam pembentukan PDRB Kota Pontianak adalah sektor Perdagangan dan jasa. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB terus mengalami peningkatan, pada tahun 2010 kontribusi sebesar 24.51 % dan pada tahun 2013 meningkat sebesar 25.98 % dengan nilai tambah bruto sebesar 4.69 triliyun rupiah.</p>	26,08%
3	Meningkatkan Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengembangan Pasar Tradisional	1 Persentase Pemanfaatan Kios/Los Pasar Tradisional	<p>a. * Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil atas izin Pemerintah Daerah dan dengan proses jual beli melalui tawar menawar. * pasar tradisional binaan terdiri dari : Pasar puring, Pasar flamboyan, Pasar Dahlia. Pasar teratai, Pasar kemuning, Pasar Anggrek/Kenanga, dan Pasar Cempaka . data pedagang yang tertampung di pasar tradisional binaan diperoleh melalui menginventarisir jumlah pedagang yang telah melunaskan kewajiban untuk berdagang di pasar tradisional binaan pada tahun tertentu dibanding dengan target pedagang yang diinginkan.</p> <p>b. cara perhitungan rumus $\frac{\sum \text{pedagang yang memanfaatkan Kios/Los di pasar tradisional binaan Tahun } n}{\sum \text{Kios/Los Pasar Tradisional Binaan}} \times 100 \%$</p> <p>c. contoh $\frac{\sum \text{Kios/Los Pasar Tradisional binaan yang dimanfaatkan Tahun } n \text{ sebanyak } 3100 \text{ unit}}{\sum \text{Kios/Los pasar tradisional binaan sebanyak } 3770 \text{ unit}} \times 100\% = 82,23 \%$ 3100 Unit 3770 Unit kesimpulan Persentase Pemanfaatan Kios/Los Pasar Tradisional tahun n adalah 82,23%, semakin tinggi persentase pemanfaatan menunjukkan kinerja yang baik.</p>	80%

4	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan dan Saing Koperasi dan UMKM	1	Persentase Koperasi Aktif	<p>a Penjelasan Koperasi yang dikategorikan koperasi aktif adalah koperasi yang masih menjalankan aktivitas usahanya (ada transaksi kopersai), dan aktivitas organisasi (Pengurus, pengawas dan anggota memenuhi persyaratan dalam UU No. 25 Tahun 1992, melaksanakan Rapat Anggota Tahunan)</p> <p>* Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif tahun N}}{\text{(Jumlah secara keseluruhan yang berbadan hukum - Jumlah koperasi tidak aktif yang tidak bisa dibina)}} \times 100\%$	90.19%
		2	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah	<p>a Penjelasan Data Prosentase Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diperoleh melalui membandingkan jumlah UMKM pada tahun tertentu (n) dikurangi jumlah UMKM tahun sebelumnya dibandingkan dengan jumlah UMKM secara keseluruhan sampai tahun sebelumnya</p> <p>* Perhitungan</p> $\frac{\text{(Jumlah UMKM tahun N - Jumlah UMKM tahun N-1)}}{\text{Jumlah UMKM tahun N-1}} \times 100\%$	3.52%

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2015
DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KOTA PONTIANAK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Penjelasan / From Perhitungan	TARGET
1	2	3	5	
1.	Meningkatkan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Persentase Peningkatan Produktivitas - Padi - Ubi Kayu - Keladi	$\left[\frac{\left(\frac{\text{produksiTahun}(n)}{\text{luaspanentahun}(n)} \right) - \left(\frac{\text{produksitahun}(n-1)}{\text{luaspanentahun}(n-1)} \right)}{\left(\frac{\text{produksitahun}(n-1)}{\text{luaspanentahun}(n-1)} \right)} \right] \times 100\%$	6.95 0.61 0.10
		2. Persentase Peningkatan Produktivitas Sayuran - Sawi - Bayam - Kangkung Buah-buahan - Pepaya Biofarmaka - Lidah Buaya	$\left[\frac{\left(\frac{\text{produksiTahun}(n)}{\text{luaspanentahun}(n)} \right) - \left(\frac{\text{produksitahun}(n-1)}{\text{luaspanentahun}(n-1)} \right)}{\left(\frac{\text{produksitahun}(n-1)}{\text{luaspanentahun}(n-1)} \right)} \right] \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Kasus Penyakit tahun N (n-1)} - \text{Jumlah Kasus Penyakit tahun N (n)}}{\text{Jumlah Kasus Penyakit tahun N (n-1)}} \times 100\%$	2.65 11.72 2.51 0.06 5.27
2.	Meningkatkan Ketersediaan Bahan Pangan Asal Hewan yang ASU (Aman Sehat Utuh) dan ASUH (Aman Sehat Utuh & Halal)	f. Persentase Peningkatan Ketersediaan Bahan - Daging Sapi - Daging Ayam - Daging Kambing - Daging Babi - Daging Itik	$\frac{\text{Ketersediaan tahun (N)} - \text{Ketersediaan tahun (N-1)}}{\text{Ketersediaan tahun (N-1)}} \times 100\%$	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
			$\frac{\text{Jumlah Kasus Penyakit tahun N (n-1)} - \text{Jumlah Kasus Penyakit tahun N (n)}}{\text{Jumlah Kasus Penyakit tahun N (n-1)}} \times 100\%$	2.13
3.	Menurunkan Kasus Penyakit Hewan dan Ternak	1. Persentase Penurunan Kasus Kejadian Penyakit Hewan dan Ternak (%)	$\frac{\text{Jumlah Kasus Penyakit tahun N (n-1)} - \text{Jumlah Kasus Penyakit tahun N (n)}}{\text{Jumlah Kasus Penyakit tahun N (n-1)}} \times 100\%$	0.27
4.	Menurunkan Luas Lahan Kritis	1. Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis (%)	$\left[\frac{(\text{luaslahankritistahun}(n-1)) - (\text{luaslahankritistahun}(n))}{\text{luaslahankritistahun}(n-1)} \right] \times 100\%$	2.86
5.	Menurunkan Peredaran Hasil Hutan yang Illegal	1. Persentase Penurunan Pelaku Usaha yang memanfaatkan Hasil Hutan Illegal (%)	$\left[\frac{(\text{jlhPelakuUsahatahun}(n-1)) - (\text{jlhPelakuUsahaTahun}(n))}{\text{jlhPelakuUsahaTahun}(n-1)} \right] \times 100\%$	5.00 1.00 2.94
7.	Mengoptimalkan Fungsi UPTD Agribisnis, RPH Sapi dan Pangkalan Pendaratan Ikan	1. Persentase Peningkatan Kepuasan Pengunjung UPTD Agribisnis (%)	$\left[\frac{(\text{Penghasilantahun}(n)) - (\text{Penghasilantahun}(n-1))}{(\text{Penghasilantahun}(n-1))} \right] \times 100\%$	1.85
		2. Persentase Peningkatan Retribusi UPTD RPH Sapi (%)	$\left[\frac{(\text{Penghasilantahun}(n)) - (\text{Penghasilantahun}(n-1))}{(\text{Penghasilantahun}(n-1))} \right] \times 100\%$	(32.14)
		3. Persentase Peningkatan Retribusi UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) (%)	$\left[\frac{(\text{NilaiSKMtahun}(n)) - (\text{NilaiSKMtahun}(n-1))}{(\text{NilaiSKMtahun}(n-1))} \right] \times 100\%$	0.00

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PONTIANAK**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Penjelasan / From Perhitungan	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas prestasi kepemudaan	1	Jumlah pemuda berprestasi di tingkat	50%
		2	Jumlah peserta diklatpim pemuda	40%
		3	Jumlah pemuda yang ikut aksi bhakti sosial	60%
		4	Jumlah pemuda yang ikut serta dalam dialog	240 orang
		5	Jumlah peserta seleksi paskibra kota	125 orang
		6	Jumlah peserta yang terpilih sebagai pemuda	4 orang
		7	Jumlah peserta yang terpilih untuk pertukaran	6 orang
		8	Jumlah pemuda yang ikut berpartisipasi	30 orang
		9	Jumlah peserta yang ikut pelatihan	300 orang
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas prestasi olahraga	1	Persentase meningkatnya jumlah atlet	100%
		2	Persentase meningkatnya jumlah partisipasi	100%
		3	Meningkatnya jumlah yang berprestasi pada	35 orang
		4	Meningkatnya jumlah partisipasi masyarakat	6925 org
		5	Meningkatnya partisipasi jumlah peserta	3389 org
3	Meningkatnya prasarana dan sarana olahraga	1	Persentase meningkatnya jumlah prasarana	100%
		2	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	3
		3	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	2

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015
KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI
KOTA PONTIANAK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Penjelasan / Form Perhitungan	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya keselamatan dan kelestarian Dokumen / arsip	1 Persentase jumlah arsip yang diselamatkan dan dilestarikan	<p>Perhitungan Rumus</p> $\frac{\text{Jumlah arsip yang diinfut kedalam elektronik}}{\text{Target pada tahun yang dilaporkan}} \times 100 \%$	80%
2	Meningkatnya minat baca masyarakat melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi	1 Jumlah kunjungan perpustakaan dan tempat baca yang dikelola Pemerintah Kota Pontianak	<p>Perhitungan Rumus</p> $\frac{\text{Target jumlah pengunjung pada tahun yang dilaporkan}}{\text{Target pengadaan buku pada tahun yang dilaporkan}} \times 100 \%$	78%
		2 Jumlah koleksi buku di perpustakaan dan tempat baca yang dikelola Pemerintah Kota Pontianak	<p>Perhitungan Rumus</p> $\frac{\text{Jumlah pengadaan koleksi buku pada tahun yang dilaporkan}}{\text{Jumlah pengunjung pada tahun yang dilaporkan}} \times 100 \%$	75%

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2015
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PONTIANAK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Penjelasan / Form Perhitungan	TARGET
1	2	3	4	5
1	Menciptakan situasi keamanan dalam upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban	1 Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Perhitungan Rumus $\text{Rasio} = \frac{\sum \text{kelomp. patroli dikalikan 3 patroli dalam sehari}}{\sum \text{kelompok kecamatan (jumlah kecamatan)}}$	96%
2	Menciptakan kepastian hukum untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta situasi yang kondusif demi mendukung iklim investasi	1 Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Perhitungan Rumus $\frac{\sum \text{pelanggaran perda/perkada yang diselesaikan}}{\sum \text{pelanggaran perda/perkada yg dilaporkan/dipantau}} \times 100 \%$	87%
3	Menciptakan peran aktif masyarakat dalam perlindungan masyarakat demi mewujudkan lingkungan masyarakat yang tentram dan tertib	1 Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat	Perhitungan Rumus $\text{Rasio} = \frac{\sum \text{satuan Linmas}}{\sum \text{RT}}$	96%

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2015
CAMAT PONTIANAK TIMUR
KOTA PONTIANAK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Penjelasan / Form Perhitungan	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas Publik yang Prima Kepada Masyarakat	1 Nilai Kepatuhan pelayanan Publik	<p>a. Penjelasan Indikator ini menggunakan hasil pengukuran secara periodik oleh lembaga di luar Kecamatan Pontianak Timur yakni Ombudsman, yang biasanya dilakukan sekali dalam setahun.</p> <p>b. Cara perhitungan rumus Nilai Kepatuhan pelayanan publik didapat dari hasil pengukuran oleh lembaga lain diluar Kecamatan Pontianak Timur yakni Ombudsman, yang mana nilai ini merupakan akumulasi dari penilaian terhadap komponen pelayanan publik mulai dari sarana dan prasarana pelayanan hingga pelaksanaan pelayanan (kecepatan dan ketepatan serta kenyamanan pelayanan)</p>	81%
2	Meningkatnya koordinasi Pembangunan Kecamatan dengan Masyarakat	1 Persentase hasil Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam forum SKPD dibidang Fisik dan Prasarana, Ekonomi, dan Sosial Budaya	<p>a. Penjelasan</p> <p>b. Persentase hasil musrenbang tingkat kecamatan yang terakomodir dalam forum SKPD dicapai melalui perbandingan hasil musrenbang tingkat kecamatan bidang fisik dan prasaran, ekonomi serta sosial dan budaya yang diakomodir SKPD dengan hasil usulan musrenbang tingkat kecamatan bidang fisik dan prasaran yang prioritas</p> <p>Cara Perhitungan Rumus</p> <p>* Fisik dan Prasarana</p> $\frac{\text{Hasil musrenbang tingkat kecamatan bidang fisik dan prasaran yang diakomodir SKPD}}{\text{Hasil usulan musrenbang tingkat kecamatan bidang fisik dan prasaran yang prioritas}} \times 100\%$ <p>* Ekonomi</p> $\frac{\text{Hasil musrenbang tingkat kecamatan bidang ekonomi yang diakomodir SKPD}}{\text{Hasil usulan musrenbang tingkat kecamatan bidang ekonomi yang prioritas}} \times 100\%$ <p>* Sosial Budaya</p> $\frac{\text{Hasil musrenbang tingkat kecamatan bidang sosial budaya yang diakomodir SKPD}}{\text{Hasil usulan musrenbang tingkat kecamatan bidang sosial budaya yang prioritas}} \times 100\%$	82%
3	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	1 Persentase keterlibatan RT dalam kegiatan pembangunan di kecamatan: Gotong royong, perayaan hari besar keagamaan, perayaan hari besar nasional/daerah, kegiatan lomba-lomba	<p>a. Penjelasan Persentase keterlibatan RT dalam kegiatan pembangunan di kecamatan didapat dari hasil membandingkan Jumlah RT yang ikut berpartisipasi` dalam kegiatan pembangunan di Kecamatan dengan Jumlah RT yang terlibat dalam kegiatan pembangunan di Kecamatan</p> <p>b. Cara Perhitungan Rumus</p> $\frac{\text{Jumlah RT yang ikut berpartisipasi` dalam kegiatan pembangunan di Kecamatan}}{\text{Jumlah RT yang terlibat dalam kegiatan pembangunan di Kecamatan}} \times 100\%$ <p>* Gotong Royong</p> $\frac{\text{Jumlah kegiatan gotong royong seKec. Ptk Timur yg dilaksanakan dengan melibatkan RT}}{\text{Jumlah kegiatan gotong royong sekec. Ptk Timur yang melibatkan RT}} \times 100\%$ <p>* Perayaan Hari Besar Keagamaan</p>	82%

			<p>Jumlah RT yang ikut berpartisipasi` dalam kegiatan Perayaan Hari Besar Keagamaan di Kecamatan</p> $\frac{\text{Jumlah RT yang terlibat dalam kegiatan Perayaan Hari Besar Keagamaan di Kecamatan}}{\text{Jumlah RT yang terlibat dalam kegiatan Perayaan Hari Besar Keagamaan di Kecamatan}} \times 100 \%$ <p>* Perayaan Hari Besar Nasional/Daerah</p> <p>Jumlah RT yang ikut berpartisipasi` dalam kegiatan Perayaan Hari Besar Nasional Daerah Kecamatan</p> $\frac{\text{Jumlah RT yang terlibat dalam kegiatan Perayaan Hari Besar Nasional/Daerah di Kecamatan}}{\text{Jumlah RT yang terlibat dalam kegiatan Perayaan Hari Besar Nasional/Daerah di Kecamatan}} \times 100 \%$ <p>* Kegiatan Lomba-lomba</p> <p>Jumlah pelaksanaan kegiatan lomba di kecamatan yang melibatkan partisipasi masyarakat</p> $\frac{\text{Jumlah RT yang terlibat dalam kegiatan HUT RI di Kecamatan}}{\text{Jumlah RT yang terlibat dalam kegiatan HUT RI di Kecamatan}} \times 100 \%$	
4	Meningkatnya kesadaran hukum dan keamanan dan ketertiban masyarakat	1	<p>Persentase menurunnya masalah pelanggaran keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang difasilitasi di Kecamatan</p> <p>a. Penjelasan Persentase menurunnya masalah pelanggaran keamanan dan ketertiban masyarakat yang difasilitasi di Kecamatan dicapai melalui membandingkan jumlah realisasi kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan di kecamatan terhadap masalah keamanan dan ketertiban dengan Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan di kecamatan terhadap masalah keamanan dan ketertiban</p> <p>b. Cara Perhitungan Rumus</p> $\frac{\text{Jumlah realisasi kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan di kecamatan terhadap masalah keamanan dan ketertiban}}{\text{Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan di kecamatan terhadap masalah keamanan dan ketertiban}} \times 100 \%$	91%

			<p>* PKL $\frac{\text{Jumlah realisasi kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan di kecamatan terhadap masalah Keamanan dan Ketertiban}}{\text{Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan di kecamatan terhadap masalah Keamanan dan Ketertiban}} \times 100 \%$</p> <p>* Bangunan Liar $\frac{\text{Jumlah realisasi kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan di kecamatan terhadap masalah Bangunan Liar}}{\text{Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan di kecamatan terhadap masalah Bangunan Liar}} \times 100 \%$</p>	
5	Meningkatnya Penguatan lembaga sosial dan ekonomi masyarakat dan ekonomi masyarakat	1	<p>Persentase lembaga sosial masyarakat yang berperan aktif dalam layanan sosial dasar di masyarakat</p> <p>a. Penjelasan Yang dimaksudkan dengan persentase lembaga sosial masyarakat yang berperan aktif dalam layanan dasar masyarakat yakni lembaga lembaga sosial yang aktif dan responsif dalam mengedukasi masyarakat sehingga kemampuan masyarakat meningkat dicapai dengan membandingkan Jumlah realisasi kegiatan lembaga sosial yang dibina Kecamatan dengan Jumlah lembaga sosial yang aktif dan dibina Kecamatan</p> <p>b. Cara Perhitungan Rumus</p> $\frac{\text{Jumlah realisasi kegiatan lembaga sosial yang dibina Kecamatan}}{\text{Jumlah lembaga sosial yang aktif dan dibina Kecamatan}} \times 100 \%$ <p>* PKL</p> $\frac{\text{Jumlah realisasi kegiatan PKK}}{\text{Jumlah PKK yang aktif dan dibina Kecamatan}} \times 100 \%$ <p>* Posyandu</p> $\frac{\text{Jumlah realisasi kegiatan Posyandu}}{\text{Jumlah Posyandu yang aktif dan dibina Kecamatan}} \times 100 \%$ <p>* LPTQ</p> $\frac{\text{Jumlah realisasi kegiatan LPTQ}}{\text{Jumlah LPTQ yang aktif dan dibina Kecamatan}} \times 100 \%$ <p>* Pramuka</p> $\frac{\text{Jumlah realisasi kegiatan Pramuka}}{\text{Jumlah Pramuka yang aktif dan dibina Kecamatan}} \times 100 \%$	82%

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015
CAMAT PONTIANAK SELATAN
KOTA PONTIANAK**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Penjelasan / Form Perhitungan	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik yang Prima Kepada Masyarakat	1 Nilai Kepatuhan pelayanan Publik	1. Program Pelayanan Prima * Kegiatan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target Responden yang mengembalikan Kuesioner survey IKM sebanyak 900 Kuesioner * Kegiatan Peningkatan pelayanan prima, dengan target peningkatan kualitas unsur-unsur pelayanan prima sebanyak 3%	100%
2	Terakomodirnya usulan masyarakat dalam rencana kerja pembangunan daerah	2 Persentase hasil Musrembang Kecamatan yang terakomodir dalam forum SKPD dibidang Fisik dan Prasarana, Ekonomi, Sosial dan Budaya	1. Program pembinaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan * Kegiatan musrembang kecamatan dan kelurahan, dengan target jumlah usulan musrembang kecamatan dan kelurahan sebanyak 231 usulan terdiri dari : fisik = 120, ekonomi = 62, Sosial = 49. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini berjumlah 199.300.000,00	82%
3	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan	1 Persentase keterlibatan RT dalam kegiatan a. Gotong royong b. Perayaan hari besar Keagamaan c. HUT RI d. Perlombaan Kecamatan dan Kelurahan e. Inovasi unggulan kelurahan f. Data base kecamatan	1 Program pembangunan kecamatan dan kelurahan a Kegiatan profil Kecamatan dan Kelurahan, dengan target persentase dokumen yang disusun tepat waktu sebesar 100% atau sebanyak 1 dokumen dan 5 laporan profil. Anggaran yang dialokasikan Rp. 53.460.000,00 b Kegiatan perlombaan, dengan target jumlah peserta perjenis lomba sebanyak 200 orang. Anggaran yang dialokasikan Rp. 36.250.000,00 c Kegiatan inovasi unggulan kelurahan, dengan target jumlah keterlibatan masyarakat per RT/RW dalam merealisasikan produk inovasi Unggulan sebanyak 90% atau 176 RT. Anggaran yang dialokasikan Rp. 125.000.000,00 d Kegiatan pembinaan inovasi unggulan kelurahan, dengan target jumlah kegiatan yang dibina oleh kecamatan sebanyak 5 jenis kegiatan pembinaan. Anggaran yang dialokasikan Rp. 15.000.000,00 e Kegiatan lomba kebersihan dan penghijauan, dengan target jumlah 5 RT/RW yang mengikuti lomba kebersihan dan penghijauan. Anggaran yang dialokasikan Rp. 50.000.000,00 2. Program pemberdayaan masyarakat a. Kegiatan pemberdayaan masyarakat, dengan target jumlah lokasi sebanyak 6 lokasi kegiatan. Anggaran yang dialokasikan Rp. 277.598.000,00 b. Kegiatan penyusunan Data Base, dengan target penyusunan data base warga miskin dan kondisi jalan lingkungan yang memenuhi kriteria pelaporan sebesar 100% atau 6 dokumen. Anggaran yang dialokasikan Rp. 67.400.000,00 Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp. 344.998.000,00	82%

4 3	Meningkatnya fungsi fasilitasi dan koordinasi masalah keamanan dan ketertiban masyarakat di kecamatan	1 Persentase menurunnya masalah pelanggaran keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang difasilitasi di Kecamatan	<p>1 Persentase menurunnya masalah pelanggaran keamanan ketertiban masyarakat yang difasilitasi di kecamatan.</p> <p>a. Kegiatan operasional ketentraman dan ketertiban, dengan target jumlah jenis pembinaan kegiatan operasional ketentraman dan ketertiban sebanyak 20 jenis/kegiatan terdiri dari : PKL = 350, Rumah kost = 175, Warnet = 32 dan Rumah Walet = 128. Anggaran yang dialokasikan Rp. 125.240.000,00</p>	91%
5	Sasaran meningkatnya penguatan dan efektifitas lembaga sosial masyarakat	1 Persentase lembaga sosial masyarakat yang berperan aktif dalam layanan sosial dasar di masyarakat	<p>1 Persentase lembaga sosial masyarakat yang berperan aktif dalam layanan sosial dasar di masyarakat.</p> <p>1). Program pembinaan lembaga masyarakat</p> <p>a Kegiatan pembinaan lembaga masyarakat, dengan target jumlah kegiatan pembinaan lembaga masyarakat yang dilaksanakan sebanyak 46 jenis pembinaan terdiri dari : PKK = 6 posyandu = 32, FKPM = 1, FKUB = , LPM = 5 dan FPK = 1. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp. 71.868.000.00</p> <p>b Kegiatan pembinaan keagamaan, dengan target jumlah jenis kegiatan keagamaan yang dibina sebanyak 27 jenis kegiatan. Anggaran yang dialokasikan Rp. 77.500.000,00.</p> <p>c Kegiatan pembinaan olahraga, kesenian dan kebudayaan, dengan target jumlah aktifitas olahraga, kesenian dan kebudayaan yang diselenggarakan sebanyak 13 jenis kegiatan terdiri dari : Haornas = 1, Porseni = 10, Pramuka = 10, Pramuka = 1 dan P2WKSS = 1. Anggaran yang dialokasikan Rp. 32.450.000,00</p> <p>Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan ini sebesar Rp. 181,818,000,00</p>	82%

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KOTA PONTIANAK

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORM PERHITUNGAN	TARGET
1	Meningkatnya pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah dari sumbernya	1 Jumlah dan Luas lahan Pengolahan Sampah Sementara (TPSS)3R yang tersedia dengan layak di setiap lokasi	<p>Penjelasan</p> <p>Pengelolaan sampah tuntas sejak dari sumber nya difokuskan pada 6 Kecamatan. Target total luas pada tahun 2019 adalah 90.000 m² tersebar pada wilayah berpotensi sampah terbesar berdasarkan hasil analisa dan perhitungan.</p> <p>Cara perhitungan rumus</p> <p>1). Luas lahan TPSS (3R) yang tersedia (m²) /90.000 (m²)x 100</p> <p>2). Jumlah lokasi TPSS (3R) yang terbentuk / Target 9 lokasi TPSS x 100</p>	82%
		2 Persentase Kelompok Masyarakat Pengelola Sampah yang terbentuk dan di bina	<p>Penjelasan</p> <p>Kelompok masyarakat pengelola sampah yang terbentuk dan dilakukan pembinaan</p> <p>Cara perhitungan rumus</p> <p>Jumlah Kelompok pengelola sampah / jumlah TPSS yang tersedia x 100</p>	4 Kelompok
		3 Pengawasan dan penindakan kebersihan	<p>Penjelasan</p> <p>Meningkatnya kesadaran masyarakat mematuhi peraturan tentang kebersihan</p> <p>Cara perhitungan rumus</p> <p>Jumlah jumlah lokasi TPS yang dijaga / jumlah TPS yang tersedia x 100</p>	100%
		4 Persentase Pengelolaan Sampah ke TPA dan Kebersihan Kota Pontianak	<p>Pertambahan jumlah penduduk berpengaruh terhadap tingkat produksi sampah, ketersediaan TPS dan jumlah armada menjadi dasar perhitungan persentase tingkat capaian kinerja. Kota Pontianak tergolong kota besar dengan indikator produksi sampah per orang adalah 2,75 liter/orang/hari.</p> <p>Cara perhitungan rumus</p> <p>1). Jumlah Penduduk x 2,75 (liter/orang/hari) = Volume Produksi sampah kota (A)</p> <p>2). Volume pengelolaan sampah = vol angkutan (Rutin, Lembur, KSO) + 20% warga (B)</p> <p>3). % pengelolaan sampah = B / A x 100%</p>	83%
		5 Luas jalan kota dan pasar yang dilakukan penyapuan / dibersihkan	<p>Target pelayanan adalah semua lokasi jalan protokol dan pasar dapat terlayani</p> <p>Cara perhitungan rumus</p> <p>1). Jumlah ruas dan luas jalan yang di sapu / 115.500 m x 100%</p> <p>2). Jumlah lokasi pasar yang dibersihkan / jumlah pasar yang tersedia x 100%</p>	66.000 m
		6 Jumlah sampah yang diangkut pada hari-hari besar	<p>Terjaganya kondisi kebersihan kota pada hari-hari besar</p> <p>Cara perhitungan rumus</p> <p>1). Jumlah Ritase pengangkutan sampah / Target ritase pengangkutan</p> <p>Penjelasan</p>	100%

		7	Jumlah angkutan sampah yang terpelihara dalam kondisi siap pakai	Meningkatnya usia pakai alat angkut bermotor Cara perhitungan rumus Jumlah pengangkutan sampah yang dipelihara / Jumlah angkutan sampah x 100%	37 Unit
		8	Jumlah container sampah terpelihara dalam kondisi baik	Meningkatnya usia pakai container Cara perhitungan rumus Jumlah container yang dipelihara / Jumlah container x 100%	100%
		9	Jumlah pembangunan landasan konteiner baru	Meningkatnya pelayanan kebersihan angkutan sampah Cara perhitungan rumus Jumlah landasan dibangun / Jumlah target pembangunan landsan x 100%	11 unit
		10	Jumlah pengadaan container baru	Meningkatnya pelayanan kebersihan angkutan sampah Cara perhitungan rumus Jumlah pengadaan container / Jumlah target pengadaan container x 100%	3 unit
		11	Jumlah pengadaan kendraan baru dengan jumlah yang sesuai	Meningkatnya pelayanan kebersihan angkutan sampah Cara perhitungan rumus Jumlah pengadaan kendaraan / Jumlah target pengadaan kendaraan x 100%	2 Truk, 10 gerobak
		12	Terpenuhinya ketersediaan peralatan perbengkelan sarana angkutan dan pengelolaan persampahan	Meningkatnya kinerja perbengkelan Cara perhitungan rumus Jumlah pengadaan peralatan / Jumlah target pengadaan peralatan x 100%	2 Jenis
2	Meningkatnya manajemen pengelolaan TPA dan pelayanan IPLT agar kualitas lingkungan hidup terjaga	13	Jumlah Pengelolaan Sampah dengan Sistem Swakelola di TPA	Cara perhitungan rumus Total sampah yang masuk ke TPA / Total sampah yang dikelola x 100% Jumlah Ritase penyedotan / Jumlah target Ritase penyedotan x 100%	100%
		14	Peningkatan pelaksanaan operasional instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT)	Tingkat pelayanan Penyedotan Lumpur Tinja dilingkungan masyarakat Cara perhitungan rumus Jumlah Ritase penyedotan / Jumlah target Ritase penyedotan x 100%	140 ritase
		15	Rata-rata jumlah lindi (limbah cair sampah yang diproses)	Berkurangnya tingkat pencemaran lingkungan di kawasan TPA Cara perhitungan rumus Rata-rata lindi yang di proses / Target rata-rata lindi yang di proses x 100%	24 m3/hr
3	Meningkatnya Ruang terbuka hijau terhadap luas wilayah kota	16	Jumlah taman yang terpelihara dan tertata dengan baik	Meningkatnya kebersihan dan keindahan taman kota Cara perhitungan rumus 1). Jumlah taman yang dipelihara / Target taman yang dipelihara x 100%	55 Lokasi
		17	Jumlah sarana dan prasarana Pembibitan Tanaman	Meningkatnya jumlah bibit tanaman hias dan peneduk serta keindahan taman kota	1 paket
		18	Jumlah pohon dan lokasi yang dilakukan penanaman/Penghijauan	Meningkatnya kondisi penghijauan kota Cara perhitungan rumus 1). Jumlah pohon yang ditanam / Target pohon yang ditanam x 100%	500 Pohon
		19	Rata-rata jumlah pohon yang dipangkas	Terciptanya kondisi pohon peneduh yang terpelihara dan tertata dengan baik Cara perhitungan rumus 1). Jumlah pohon yang dipangkas / Target pohon yang dipangkas x 100%	576 Pohon

		20	Jumlah taman yang dibangun dan ditata	Meningkatnya kuantitas dan kualitas keindahan taman kota Cara perhitungan rumus 1). Jumlah taman yang ditata / Target taman yang ditata x 100%	3 Lokasi
		21	Rata-rata jumlah bahu dan median jalan yang ditebas	Meningkatnya kebersihan dan keindahan taman kota Cara perhitungan rumus Jumlah lokasi penebasan / Target lokasi penebasan x 100%	70 Ruas Jalan
4	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan partisipasi dalam pembayaranRetribusi Kebersihan	22	Jumlah pelaksanaan penyuluhan ditingkat Kecamatan/Kelurahan dan sekolah	Meningkatnya kesadaran masyarakat dan siswa tentang pentingnya kebersihan lingkungan Cara perhitungan rumus Jumlah pelaksanaan penyuluhan / Target pelaksanaan penyuluhan x 100%	10 lokasi/24 sekolah
		23	Jumlah kemitraan pengelolaan sampah yang terlaksana	Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dan siswa tentang pentingnya kebersihan lingkungan Cara perhitungan rumus Jumlah pengelolaan KSO angkutan sampah / Target pengelolaan KSO x 100%	17 KSO
		24	Persentase peningkatan realisasi penerimaan retribusi pelayanan kebersihan	Meningkatnya realisasi pendapatan retribusi kebersihan Cara perhitungan rumus Realisasi pendapatan retribusi / Target pendapatan retribusi x 100%	100%

WALIKOTA PONTIANAK,

SUTARMIDJI

